

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INDONESIA DALAM KERJA
SAMA DENGAN PRANCIS UNTUK PENGADAAN KAPAL SELAM
KELAS SCORPENE TAHUN 2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Abdullah Ibnu Yasa

19323021

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INDONESIA DALAM KERJA
SAMA DENGAN PRANCIS UNTUK PENGADAAN KAPAL SELAM
KELAS SCORPENE TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Abdullah Ibnu Yasa

19323021

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA DENGAN PRANCIS UNTUK PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE TAHUN 2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

08 Januari 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P, M.A

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto S.I.P, M.A.
- 2 Gustri Eni Putri, S.IP, M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP, M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 November 2024



Handwritten signature of Abdullah Ibnu Yasa.

Abdullah Ibnu Yasa

DAFTAR ISI

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA DENGAN PRANCIS UNTUK PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE TAHUN 2024.....	1
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR SINGKATAN.....	9
ABSTRAK.....	10
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	15
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2.....	17
KEPUTUSAN KERJA SAMA PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE PRANCIS FAKTOR POLITIK DOMESTIK.....	17
2.1 Politik Domestik.....	17
2.1.1 Bureaucratic Influencer.....	19
2.1.2 Partisan Influencer.....	24
2.1.3 Interest Influencer.....	28
2.1.4 Mass Influencer.....	30
BAB 3.....	34
KEPUTUSAN KERJA SAMA PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE PRANCIS FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI & MILITER	

DAN KONTEKS INTERNASIONAL.....	34
3.1 Kemampuan Ekonomi dan Militer.....	34
3.1.1 Kemampuan Ekonomi.....	35
3.1.2 Kemampuan Militer.....	39
3.2 Konteks Internasional.....	43
3.2.1 Geografis.....	43
3.2.2 Ekonomi.....	46
3.2.3 Politik.....	47
BAB 4.....	50
PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Rekomendasi.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Kurs Dollar Amerika Terhadap Rupiah Tahun 2020-2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri

Gambar 2. MoU RnD Pembangunan Kapal Selam Antara Kementerian
Pertahanan RI dan Naval Group

Gambar 3. Grafik Analisa Respon Netizen X

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Indonesia 2020-2023

Gambar 5. Peta Geografis Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

AIP	: Air Independent Propulsion
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
ALUTSISTA	: Alat Utama Sistem Senjata
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nation
AUKUS	: Australia-United Kingdom- United State
CAATSA	: Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
DCA	: Defense Cooperation Agreement
GRP	: Glass Reinforced Plastic
HDW	: Howaldtswerke-Deutsche Werft
IFDD	: Indonesia-France Defence Dialogue
KKIP	: Komite Kebijakan Industri Pertahanan
LCS	: Local Currency Settlement
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MEF	: Minimum Essential Force
MoU	: Memorandum of Understanding
PDB	: Produk Domestik Bruto
SIPRI	: Stockholm International Peace Research Institute
ToT	: Training of Trainer
ToT	: Transfer of Technology
USD	: United State Dollar
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Kementerian Pertahanan RI menandatangani kontrak pengadaan dua kapal selam kelas *Scorpene* buatan Prancis pada 28 Maret 2024. Pengadaan ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan armada militer Indonesia, seluruh proses pembangunan kapal selam kelas *Scorpene* dilakukan di PT, PAL Indonesia. Langkah sebagai implementasi dari *transfer of technology*. Penelitian ini menganalisis proses pengambilan keputusan Indonesia dalam kerja sama dengan Prancis terkait pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* pada tahun 2024 menggunakan teori pengambilan keputusan William D. Coplin yang menekankan pentingnya faktor politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Berdasarkan penelitian ini bahwa kerja sama ini didorong oleh keterbatasan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan upaya Indonesia untuk memperoleh alih teknologi yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Kata-kata kunci: Prancis, Kementerian Pertahanan RI, PT. PAL, Kapal Selam, Politik, Ekonomi, Militer, Internasional

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Defense signed a contract for the procurement of two French-made Scorpene-class submarines on March 28, 2024. This procurement is an effort to meet the needs of the Indonesian military fleet, the entire construction process of the Scorpene-class submarines is carried out at PT, PAL Indonesia. Steps as an implementation of the transfer of technology. This study analyzes Indonesia's decision-making process in cooperation with France regarding the procurement of Scorpene-class submarines in 2024 using William D. Coplin's decision-making theory which emphasizes the importance of domestic political factors, economic and military capabilities, and the international context in the foreign policy decision-making process. Based on this study, this cooperation is driven by the limited capabilities of the domestic defense industry and Indonesia's efforts to obtain technology transfer which is expected to strengthen the independence of the national defense industry.

Keywords: France, Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, PT. PAL, Submarine, Politics, Economy, Military, International

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang militer suatu negara adalah salah satu dari sekian banyak isu yang sering menjadi perhatian banyak negara, hal ini disebabkan dengan kondisi dunia yang selalu dinamis dan mengakibatkan munculnya berbagai macam konflik. Tak ayal jika negara akan memperkuat sektor militer demi menjaga kedaulatan wilayahnya (Kementerian Pertahanan, 2015).

Wilayah perairan Indonesia yang begitu luas, kaya akan sumber daya alam (SDA) dan berada pada jalur pelayaran perdagangan internasional yang strategis tentu harus dijaga oleh Indonesia dari pihak-pihak yang berpotensi melanggar wilayah kedaulatan. Indonesia perlu memiliki banyak Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang mumpuni dan canggih seperti kapal selam. Indonesia membutuhkan alat pertahanan yang efektif untuk mengawasi dan berpatroli, termasuk menghadapi ancaman bawah laut. Kapal selam hadir sebagai solusi ideal karena menawarkan kemampuan tersebut, sekaligus berperan penting dalam menjaga kedaulatan.(Sutanto et al., 2021).

Kapal selam dianggap memiliki nilai yang sangat strategis bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan. Kapal selam dipilih karena memiliki persenjataan yang mematikan, sulit terdeteksi oleh musuh dan juga memiliki daya gertak tinggi bagi negara lain yang ingin melanggar wilayah perairan Indonesia (Darmawan, Alkadrie, and Sudirman, 2020).

Maka dari itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia belakangan ini sedang gencar dalam pengadaan alutsista yang disertai transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas berbagai macam persenjataan darat, laut dan udara milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) demi menjaga kedaulatan negara. Namun Indonesia menyadari bahwa kemampuan ekonomi dan industri pertahanan dalam negeri belum memadai untuk membangun alutsista yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Indonesia (Mujiburrahman and Effendi, 2021), hal ini bisa dilihat dari anggaran pertahanan Indonesia tidak sampai satu persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Zahara and Rizky M.N. 2020).

Sebelumnya Indonesia pernah mengadakan kerja sama pengadaan kapal selam kelas *Changbogo* milik Korea Selatan. Dipilihnya Korea Selatan bukan tanpa sebab, karena pada saat itu hanya Korea Selatan yang memberikan jaminan adanya transfer teknologi yang mana itu menjadi fokus Indonesia pada saat ini (Darmawan, Alkadrie, and Sudirman, 2020)

Pada bulan Maret 2019, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam kelas *Changbogo batch* kedua, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum aktif (Wareza, 2020). Kementerian Pertahanan RI merasa bahwa tiga unit kapal selam kelas *Changbogo* masih belum memadai untuk menjaga wilayah kedaulatan negara, lagipula kapal selam tersebut belum cukup canggih jika dibandingkan dengan kapal selam buatan negara lain. Ditambah dengan fakta bahwa unit pertama kapal selam itu sempat tak maksimal saat berlayar karena bermasalah pada baterainya (Rizkia, 2023). Melihat dari adanya berbagai masalah yang ada dari kapal selam tersebut Prabowo Subianto

selaku Menteri Pertahanan merevisi proyek *batch* dua dan mencari penggantinya yang lebih mumpuni (Alausath, 2024).

Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Kementerian Pertahanan RI bersama PT. PAL Indonesia dan Kementerian Pertahanan Prancis bersama Naval Group Prancis telah menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk “melaksanakan kerja sama bidang *research and development* tentang kapal selam yang akan mengarah pada kontrak pembelian dua unit kapal selam *Scorpene* dengan sistem propulsi independen udara dan persenjataan yang lengkap”, ucap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI (PT. PAL, 2022). Pada tanggal 28 Maret 2024 Kementerian Pertahanan RI resmi menandatangani kontrak pengadaan dua kapal selam kelas *Scorpene* buatan Prancis (Kementerian Pertahanan, 2024). Pengadaan ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan armada militer Indonesia demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia serta meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi kapal selam, seluruh proses pembangunan kapal selam kelas *Scorpene* dilakukan di PT, PAL Indonesia sebagai langkah implementasi dari *transfer of technology* dan memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di PT. PAL dengan didampingi oleh teknisi dari Naval Group. Kolaborasi ini adalah bagian dari program modernisasi alutsista yang digagas oleh Kementerian Pertahanan RI untuk memperkuat TNI AL untuk menghadapi tantangan maritim selama dua dekade ke depan (PT. PAL, 2022).

Dalam kerja sama ini juga dijelaskan PT. PAL akan mendapatkan pengetahuan pengembangan sekaligus pemeliharaan teknologi baterai lithium-Ion,

sistem *Air Independent Propulsion* (AIP), dan penyimpanan energi. Kerja sama jangka panjang ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas PT. PAL dalam menguasai teknologi kunci dalam pembangunan kapal selam (Hakim, 2022).

Pembangunan ini memiliki skema *Whole Local Production* dengan Naval Group Prancis, maka dibangun berbagai macam fasilitas baru. Fasilitas itu antara lain yaitu: pertama, *Subfactory Workshop* yang terdiri dari beberapa fasilitas lagi berupa *Glass Reinforced Plastic* (GRP) *shop* yang akan digunakan untuk mengerjakan pembuatan *composite material* pada bagian-bagian kapal selam yang tidak terkena tekanan air di kedalaman, kemudian *Blasting and Painting Shop* sebagai langkah pembersihan dan pengecatan kapal selam, serta beberapa *workshop* pendukung lainnya. Kedua, pembangunan fasilitas *Shiplift* yang akan digunakan sebagai fasilitas dermaga khusus untuk kapal selam, *Shiplift* ini berguna untuk menaikkan dan menurunkan kapal selam dari dan ke dalam air. Ketiga, pembangunan fasilitas *Torpedo and Electronic Workshop* yang bertujuan untuk memproduksi senjata utama kapal selam yaitu Torpedo, tidak lupa juga tentang sistem elektronik kapal selam yang rumit dan sistem komunikasi kapal selam. Semua ini adalah teknologi dasar yang diperlukan untuk PT. PAL untuk dapat membangun kapal selam mandiri sesuai dengan ambisinya (Refano, 2024).

Kerja sama Indonesia dan Prancis dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya dalam pengadaan pesawat tempur *Dassault Rafale*. Pada tanggal 10 Februari 2022 Kementerian Pertahanan RI resmi meneken kontrak untuk mendatangkan 42 *Dassault Rafale* dengan total anggaran sebesar USD 8,1 miliar atau sekitar 116 triliun Rupiah.

Pengadaan pesawat tempur ini memiliki program *offset* dan *Training of Trainer* (ToT) yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation Prancis (Hastami and Abidin, 2023).

Berbagai kerja sama disertai transfer teknologi di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah langkah untuk dapat membangun kemandirian dan mampu bersaing sebagai produsen alutsista di kancah global. Sebagai tindak lanjut dari target tersebut, maka dibentuklah perusahaan induk bernama *Defence Industry Indonesia* (Defend ID). Defend ID merupakan gabungan dari lima BUMN di bidang pertahanan yaitu, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana dan PT. Len Industri sebagai induk perusahaan. Lebih lanjut lagi Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024 Defend ID masuk sebagai 50 industri pertahanan terbesar di dunia (Hidranto, 2022). Untuk mencapai target tersebut setidaknya ada dua tantangan yang dihadapi yaitu penguasaan teknologi dan peningkatan skill sumber daya manusia. "Teknologi tinggi ini kaitannya ada dua, yaitu bagaimana penguasaan teknologinya dan yang kedua adalah bagaimana pembangunan manusianya. Tantangannya di situ yang paling berat," ucap Bobby Rasyidin selaku Direktur Umum Defend ID sekaligus Direktur Umum PT. Len Industri (Mawangi, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut: **Mengapa Indonesia mengadakan kerja sama dan transfer teknologi dalam pengadaan kapal selam kelas Scorpene milik Prancis?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Indonesia mengadakan kerja sama dan transfer teknologi dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* milik Prancis.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini akan membahas tentang analisis proses pengambilan keputusan Indonesia dan Prancis dalam kerja sama pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* . Jangkauan waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah sejak tahun 2020 hingga 2024, hal ini sehubungan dengan Kementerian Pertahanan RI yang berencana menambah tiga kapal selam kelas *Changbogo* dari Korea Selatan pada 2019, namun rencana itu beralih dengan memilih kapal selam kelas *Scorpene* dari Prancis karena kapal selam dari Korea Selatan ternyata memiliki beberapa masalah teknis dan tidak sesuai harapan awal. Kontrak pengadaan tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Prancis pada tanggal 28 Maret 2024 di galangan Kapal PT. PAL Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada alasan Indonesia memilih melakukan kerja sama dengan Prancis alih-alih melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, pada jurnal Padjadjaran Journal of International Relation yang berjudul “kerja sama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya

Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia” yang ditulis oleh Wawan Budi Darmawan, Jafar Alkadrie dan Arfin Sudirman menjelaskan bahwa *Maritime security* atau keamanan maritim merupakan kata yang baru dalam dunia internasional. pada umumnya keamanan maritim berbicara mengenai berbagai macam bentuk ancaman yang sering terjadi di wilayah perairan seperti sengketa perairan antar negara, terorisme, pencurian sumber daya alam (SDA), perdagangan manusia dan barang ilegal, pembajakan kapal suatu negara, atau kecelakaan yang terjadi di perairan. Adanya kebijakan MEF yang harus dipenuhi sebagai postur pertahanan Indonesia, dengan ditetapkannya MEF perlu adanya modernisasi alutsista yang telah tergerus oleh umur dengan tidak lupa mengembangkan industri pertahanan yang mandiri.

Selain itu pada jurnal ini juga mengkaji bentuk kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan. kerja sama ini tidak hanya pengadaan saja namun juga adanya transfer teknologi pembuatan kapal selam kelas Changbogo. Dipilihnya Korea Selatan juga bukan tanpa sebab, karena mengingat kebutuhan industri pertahanan Indonesia yang belum memiliki kemampuan untuk mandiri, sedangkan hanya Korea Selatan yang memberi jaminan adanya transfer teknologi. (Darmawan, Alkadrie, and Sudirman, 2020).

Lalu, jurnal kedua dari Diplomacy and Global Security Journal yang ditulis oleh Artha Setya Anggara dengan judul “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Pertahanan Dengan Prancis Tahun 2020-2024” menjabarkan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Prancis telah terjalin sejak 1950. Pada tahun 2020, kedua negara menandatangani Defense Cooperation Agreement (DCA) yang mencakup berbagai aspek, termasuk pembelian jet tempur Dassault Rafale,

pendidikan militer, dan pengembangan industri pertahanan. Kerja sama ini berkontribusi pada pencapaian Minimum Essential Force (MEF) tahap III (2020-2024), yang bertujuan memodernisasi kekuatan pertahanan Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis adalah pengadaan 42 unit jet tempur Dassault Rafale. Pesawat ini dirancang dengan kemampuan multi-fungsi, termasuk serangan darat, serangan laut, pengintaian, dan pencegahan ancaman nuklir. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pembelian kapal selam kelas Scorpene serta satelit untuk keperluan pertahanan. Kemitraan strategis ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas militer Indonesia tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai aktor strategis di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Langkah ini konsisten dengan upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan serta mendukung implementasi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* dan strategi Prancis di wilayah yang sama (Anggara, 2024).

Kemudian pada Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi yang berjudul “Studi Kebijakan dalam Pengadaan Dassault Rafale sebagai Alutsista Indonesia” yang ditulis oleh Novitasari Wahyu Hastami dan Ali Zainal Abidin ini mengkaji tentang keputusan Indonesia untuk membeli pesawat tempur *Dassault Rafale* dari faktor ekonomi dan politik, walaupun ada pesawat *Sukhoi Su-35* dari Rusia yang lebih murah dan canggih. Adanya sanksi embargo Undang-undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) dari AS bagi negara yang membeli alutsista dari Rusia menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia. Akhirnya Indonesia memilih *Dassault Rafale* dari Prancis sebagai alutsista masa depan. Kerja sama ini mencakup pembelian 42 *Dassault Rafale*

dengan nilai kontrak sebesar USD 8,1 miliar dengan skema program *offset* dan *Training of Trainer*. Namun pengadaan ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia, karena ini adalah kali pertama Indonesia memiliki pesawat tempur dari Prancis, karena sebelumnya Indonesia hanya memiliki pengalaman menggunakan pesawat tempur milik AS dan Rusia. (Hastami and Abidin, 2023)

Dari ketiga jurnal yang penulis ambil sebagai acuan, belum ada yang membahas tentang kerja sama antara Indonesia dan Prancis dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene*, karena memang kerja sama ini baru resmi beberapa bulan yang lalu dan belum ada jurnal yang spesifik membahas tentang kerja sama tersebut. Alasan penulis menggunakan tiga jurnal tersebut karena masih memiliki hubungan dengan kerja sama pengadaan kapal selam dari Prancis.

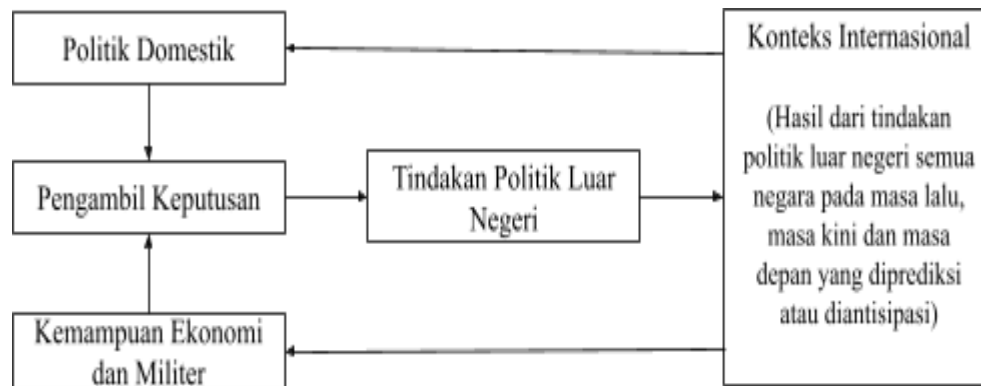
1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap negara tentu akan selalu menentukan kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sebelum mengambil keputusan terhadap isu tertentu, penting bahwa negara harus memahami berbagai aspek yang relevan. Negara-negara menggunakan hitungan rasional dari berbagai aspek dalam politik global.

Menurut teori *Decision Making* dari William D. Coplin dalam bukunya *Introduction to International Politics*, ada beberapa faktor penting yang dapat menjadi penjelasan kenapa negara memilih suatu kebijakan, seperti kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional yang sedang dihadapi negara tersebut. Teori tersebut juga menjelaskan bagaimana negara membuat keputusan sebelum keputusan tersebut

dijadikan sebagai kebijakan luar negeri sebagai tindakan suatu negara (Coplin, 2003).

Gambar 1. Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri



Sumber: (Coplin 2003, 30)

Tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan kebijakan luar negeri:

A. Politik Domestik

Politik domestik memiliki peranan yang cukup besar dalam keputusan negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Coplin sendiri menyebut bahwa negara tidak akan bisa menentukan tindakannya tanpa adanya aktor-aktor politik domestik yang mementingkan kepentingan negaranya masing-masing. Merekalah yang merancang, mengatur strategi, menginisiasi tindakan dan mempengaruhi para pengambil keputusan. Aktor-aktor politik ini disebut oleh Coplin sebagai *Policy Influencers* (Coplin, 2003).

Para *Policy Influencers* ini dibagi menjadi empat macam (Coplin, 2003) :

1. *Bureaucratic Influencers*, merujuk pada individu atau instansi yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif negara, mereka

adalah aktor kunci dalam pengambilan keputusan karena berada langsung di dalam garis struktural pemerintahan.

2. *Partisan Influencers*, merujuk pada partai politik yang menduduki kursi legislatif, mereka adalah penyambung suara antara lembaga eksekutif dan masyarakat.
3. *Interest Influencers*, merujuk pada individu atau organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan.
4. *Mass Influencers*, merujuk pada bagaimana dukungan atau penolakan dari opini publik yang sedang beredar luas.

B. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Perlu diingat bahwa faktor kemampuan ekonomi dan militer juga merupakan faktor penting yang dijadikan pertimbangan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan luar negerinya selain faktor politik domestik. Para pengambil keputusan harus menilai secara cermat kapabilitas negara dengan pertimbangan terbatasnya kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer telah lama dianggap sebagai indikator kekuatan negara yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan (Coplin, 2003).

Coplin membagi kemampuan ekonomi menjadi dua dimensi yang berbeda yaitu (Coplin, 2003):

1. Kapasitas produksi barang dan jasa
2. Ketergantungan pada perdagangan dan keuangan internasional.

Sedangkan dalam kemampuan militer dibagi menjadi tiga dimensi yaitu (Coplin, 2003):

1. Kekuatan militer
2. Ketergantungan pada sumber-sumber negara lain dan

Jika negara memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, tentu para pengambil keputusan akan lebih berani dan menjadikan dua faktor itu sebagai daya tawar bagi kebijakan luar negerinya (Coplin, 2003).

C. Konteks Internasional

Konteks Internasional adalah hasil dari tindakan politik luar negeri semua negara pada masa lalu, masa kini dan masa depan yang diprediksi atau diantisipasi oleh para pengambil keputusan. Meskipun konteks internasional bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, namun konteks internasional tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan suatu keputusan (Coplin, 2003).

Coplin mengatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam konteks internasional yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu (Coplin, 2003).:

1. Geografis yang berhubungan dengan hubungan antar negara, aliansi, logistik militer.
2. Ekonomi berhubungan dengan pola perdagangan, negara-negara berkembang cenderung bergantung dengan negara maju.
3. Politik berhubungan dengan pola hubungan politik dengan negara lain, dukungan dari negara lain yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori *Decision Making* dari William D. Coplin, kebijakan kerja sama antara Indonesia dan Prancis dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* dapat dilihat dari tiga faktor penting yaitu:

1. Politik domestik yaitu Menteri Pertahanan RI yaitu Prabowo Subianto sebagai *Bureaucratic Influencers* menyadari bahwa perlu adanya modernisasi alutsista serta mewujudkan industri pertahanan yang mandiri untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sesuai upaya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF). Kebijakan ini mendapat respon yang positif dari berbagai anggota partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai *Partisan Influencers*, PT. TMI yang disinyalir mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini karena memiliki kedekatan khusus dengan Menteri Pertahanan sebagai *Interest Influencers* dan masyarakat sebagai *Mass Influencers*.
2. Kemampuan ekonomi dan militer juga menjadi faktor penting dalam kebijakan antara Indonesia dan Prancis. Prancis siap memberikan jaminan adanya transfer teknologi. Industri pertahanan Indonesia juga dirasa sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun kapal selam, karena sebelumnya PT. PAL sudah berhasil dengan kapal selam *Changbogo* dari Korea Selatan. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan kembali bagi industri pertahanan karena kapal selam *Scorpene* lebih canggih daripada kapal selam *Changbogo*. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena bisa mendapatkan kapal selam canggih serta mendapatkan kemampuan untuk memelihara hingga membangun kapal selam secara mandiri yang dapat dipastikan juga akan menciptakan lapangan kerja baru,

meningkatkan ekonomi dan selaras dengan ambisi Defend ID yang pada tahun 2024 akan masuk sebagai 50 negara pengeksport alutsista terbesar di dunia.

3. Sesuai dengan tiga elemen konteks internasional yang dijabarkan oleh Coplin. Indonesia memiliki bentang geografis yang strategis di wilayah perairan, karena diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki SDA yang sangat melimpah. Belum lagi dengan meningkatnya tensi di wilayah Laut Cina Selatan. kerja sama ini juga diharapkan meningkatkan ekonomi dan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara-negara maju serta memperkuat lagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami situasi sosial, fenomena, interaksi dan kelompok dengan studi kasus di atas. Penelitian kualitatif dipilih juga karena bersifat deskriptif yang akan memudahkan penulis dalam memahami setiap kata atau gambar yang didapat dari data yang telah dikumpulkan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah Pemerintah Indonesia yang melaksanakan kerja sama dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene*. Kemudian Objek Penelitian adalah keputusan kerja sama dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara *crawling data* dari media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Twitter yang dihubungkan dengan aplikasi *Google Collaboratory*

2. Data sekunder.

Data sekunder yang dipilih berasal dari berbagai media seperti, buku teks akademis, jurnal-jurnal, serta sumber literatur lainnya yang mendukung penelitian dan bisa dipercaya kredibilitasnya.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Pra-penelitian

Pra Penelitian adalah aktivitas melihat dan memetakan bahan bacaan atau sumber data yang relevan dengan tema penelitian.

2. Pengambilan Data

Penelitian ini mengambil data sekunder dengan berbagai media cetak maupun digital yang relevan dengan tema penelitian dan *crawling data* pada media sosial Twitter dengan kata kunci Scorpene Indonesia.

3. Analisa data

- a. Setelah data sekunder yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya data dianalisis dengan kerangka pemikiran yang dipilih dan hasil analisis diberikan kesimpulan dari penelitian tersebut.
- b. Data primer hasil *crawling data* dari Twitter yang belum diolah lalu dimodifikasi melalui beberapa proses, yaitu: *cleaning*, *tokenize*, dan

translate. Data hasil modifikasi lalu dianalisis menggunakan metode sentimen klasifikasi *Naïve Bayes*. Hasilnya berupa grafik sentimen positif, negatif dan netral.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab. Dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 adalah pendahuluan dan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran singkat tentang masalah yang sedang diteliti dengan tujuan mengetahui maksud dan tujuan penelitian.

BAB 2 berisi tentang analisis faktor politik domestik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kerja sama dengan Prancis.

BAB 3 adalah analisis faktor kemampuan ekonomi dan militer serta faktor konteks internasional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kerja sama dengan Prancis.

BAB 4 adalah Penutup. Pada bab ini akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang ada di BAB 1, serta memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Tujuannya adalah penjelasan secara singkat dan padat dari jawaban penelitian ini.

BAB 2

KEPUTUSAN KERJA SAMA PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE PRANCIS FAKTOR POLITIK DOMESTIK

Pada bab 1 telah memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori hingga sistematika pembahasan. Bab 2 ini akan memberikan penjelasan analisis proses pengambilan keputusan Indonesia dalam kerja sama dengan Prancis untuk pengadaan kapal selam kelas Scorpene di 2024 dari faktor politik domestik Indonesia. Pembahasan bab 2 akan diawali dengan penjabaran teori pengambilan keputusan dari faktor politik domestik menurut William Coplin. Kemudian, pengaruh dari aktor-aktor politik seperti birokrat, partai, kepentingan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan.

2.1 Politik Domestik

Dalam membuat kebijakan luar negerinya, para pengambil keputusan tidak akan bekerja sendirian. Hal ini karena adanya pola interaksi antara pengambil keputusan dengan aktor-aktor politik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Aktor-aktor politik ini disebut oleh Coplin sebagai *Policy Influencers* (Coplin, 2003).

Pola interaksi antara para pengambil keputusan dan *Policy Influencers* ini bersifat saling mempengaruhi dan memiliki timbal balik yang sangat kompleks. Hubungan entitas ini sangat erat dan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai “sistem pengaruh kebijakan” (*Policy Influence System*). Sistem

ini tidak bisa dipisahkan dalam setiap kebijakan luar negeri suatu negara. Karena para pengambil keputusan perlu adanya dukungan dari *Policy Influencers*, sedangkan para *Policy Influencers* berharap kebijakan luar negeri akan sejalan dengan kepentingan mereka (Coplin, 2003).

Para pengambil keputusan sangat perlu adanya dukungan dari *Policy Influencers*. Bentuk dukungan tersebut tidak pernah melihat latar belakang ataupun sistem politik suatu negara, entah negara tersebut menganut sistem demokrasi atau monarki. *Policy Influencers* punya berbagai macam cara dalam memberikan dukungan terhadap para pengambil keputusan melalui:

1. Dukungan Keuangan: Uang yang diberikan oleh para pebisnis atau kelompok bisnis untuk menjalankan kegiatan politik dan kebijakan negara.
2. Dukungan Militer: Kesetiaan yang diberikan oleh pasukan militer untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.
3. Dukungan Masyarakat: Masyarakat yang akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum, aktif dalam kegiatan politik dan turut mendukung setiap kebijakan negara.
4. Dukungan Lain: Setiap dukungan yang dapat mempermudah jalannya kebijakan seperti dukungan dari partai politik, tokoh negara dan opini publik.

Dengan adanya dukungan ini sangat penting bagi para pengambil keputusan demi menjaga kekuasaannya dan mempermudah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan negara (Coplin, 2003).

Policy Influencers pasti juga membutuhkan dukungan dari para pengambil keputusan dengan harapan kebijakan negara akan sesuai dengan keinginan mereka. Jika keinginan ini tidak dapat dipenuhi oleh pengambil keputusan, maka tak heran jika *Policy Influencers* akan setiap bentuk dukungan akan hilang secara perlahan hingga tidak adanya dukungan sama sekali. Para pengambil keputusan tidak serta merta memenuhi setiap keinginan *Policy Influencer* dan memberikan alasan bahwa keinginan ini tidak dapat dipenuhi. Namun, para pengambil keputusan akan memiliki batasan untuk bisa mengabaikan keinginan tersebut dengan tidak mengabaikan keinginan yang kecil. Coplin sendiri membagi para *Policy Influencer* ini menjadi empat tipe, yaitu *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, dan *Mass Influencer* (Coplin, 2003).

2.1.1 Bureaucratic Influencer

Bureaucratic Influencer (Birokrat yang mempengaruhi) adalah lembaga-lembaga negara yang berada pada struktur pusat pemerintahan yang memiliki peranan kunci dan punya pengaruh sangat besar dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, karena lembaga-lembaga inilah yang dekat dengan para pengambil keputusan. Mereka tidak sekedar menyampaikan informasi dan masukan kepada para pengambil keputusan, mereka juga seringkali terlibat secara langsung dalam memutuskan kebijakan dan memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut (Coplin, 2003).

Negara-negara berkembang memiliki hambatan dalam membangun postur pertahanan negaranya karena negara berkembang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi, seperti yang terjadi pada Indonesia. Hal ini tercermin dari rendahnya total Produk Domestik Bruto (PDB) yang berakibat anggaran untuk membangun postur pertahanan juga tidak bisa maksimal. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kajian yang panjang serta perencanaan yang matang untuk menentukan keputusan dalam membangun postur pertahanan yang bersifat jangka panjang. Rencana ini harus selaras dengan tujuan nasional demi terwujudnya kesejahteraan negara. Ekonomi yang kuat dan militer yang modern adalah dua pilar utama dalam membangun postur pertahanan negara (Bakrie, 2007).

Dalam kasus yang terjadi pada Proses Pengambilan Keputusan Indonesia dan Prancis Dalam kerja sama Pengadaan Kapal Selam Kelas Scorpene di 2024 terdapat faktor politik domestik dalam tipe *Bureaucratic Influencer* (Birokrat yang mempengaruhi) yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan tersebut, yaitu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang notabene adalah orang nomor satu di Kementerian Pertahanan RI dan memiliki pengaruh paling kuat dalam kebijakan ini (Kementerian Pertahanan, 2024).

A. Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI)

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16 ayat (3) mengamanatkan Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan

umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden (Badan Pemeriksa Keuangan, 2002).

Sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berperan sangat penting dalam setiap keputusan untuk kebijakan negara di sektor pertahanan. Hal ini senada dengan adanya perintah secara langsung dari Presiden Joko Widodo untuk membuat *master plan* terkait pertahanan negara. "Presiden telah memerintahkan saya tahun lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan," Sebagai langkah awal dari *master plan* tersebut, lantas Prabowo segera merancang kebutuhan alutsista untuk pertahanan negara (Asmara, 2021). Prabowo sendiri telah banyak melakukan pengadaan alutsista di tiga matra yang berbeda, seperti 500 unit kendaraan taktis (rantis) 4x4 dari PT Pindad, 8 unit kapal perang permukaan dari Italia, puluhan pesawat tempur dari Prancis, kapal *Submarine Rescue Vehicle System* (SRVS) dari Inggris serta 2 unit kapal selam kelas *Scorpene* dari Prancis (Puspita, 2024).

Selama menjabat, Prabowo Subianto sering melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan menteri pertahanan seperti negara tetangga di kawasan ASEAN, Ia juga kerap kali mengunjungi negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer kuat, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, dan Inggris. Kelima negara ini adalah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kemampuan nuklir. Kunjungan-kunjungan ini sering kali bertujuan

untuk menjajaki kerja sama dan pembelian (alutsista) guna memperkuat kemampuan TNI (Putra, 2024).

Prabowo juga menggantungkan kontrak kerja sama dengan Korea Selatan untuk pengadaan kapal selam kelas *Changbogo batch* dua yang sudah disepakati sejak 2019 dan tinggal menunggu pengaktifan dari kontrak tersebut (Wareza, 2020). Prabowo Subianto dikabarkan kecewa dengan kualitas kapal selam tersebut, ditambah adanya berbagai permasalahan teknis hingga kapal selam itu harus kembali ke Korea Selatan untuk perbaikan. Maka tak heran jika Prabowo mencari pengganti yang dianggap lebih baik (Rizkia, 2023).

Kapal selam kelas *Scorpene* dari Prancis akhirnya dipilih oleh Prabowo karena memiliki berbagai kemampuan yang mumpuni seperti penggunaan baterai *Lithium-Ion* berkapasitas penuh, memberikannya keunggulan dalam durasi operasi dan performa, kemampuan indiscretion rate (tidak terdeteksi oleh saat beroperasi di bawah air) sebesar 4,5%, serta teknologi sonar yang canggih, yang memungkinkan kapal selam mendeteksi dan menganalisis informasi bawah air dengan lebih akurat dan cepat. Hal ini meningkatkan kemampuan kapal selam dalam mengambil keputusan strategis dan merespons ancaman dengan lebih efektif (Kementerian Pertahanan, 2024).

Rencana Prabowo untuk pengadaan kapal selam ini ditanggapi Presiden Jokowi bahwa itu akan dibicarakan pada rapat terbatas dengan Prabowo nantinya (Ihsanuddin and Rastika, 2020). Kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Prancis resmi menandatangani kontrak untuk pengadaan 2 unit kapal selam kelas *Scorpene*.

Seluruh pembangunan kapal selam ini akan dilakukan di PT. PAL Indonesia dengan bantuan dari Naval Group (PT. PAL, 2022). PT. PAL akan mendapatkan pengetahuan pengembangan sekaligus pemeliharaan teknologi baterai lithium-Ion, sistem Air Independent Propulsion (AIP), dan penyimpanan energi (Hakim, 2022). Pembangunan beberapa *workshop* dan fasilitas *Torpedo and Electronic Workshop* bertujuan untuk memproduksi torpedo sebagai senjata utama kapal selam, serta mendukung sistem elektronik dan komunikasi yang rumit. Fasilitas ini menjadi langkah penting bagi PT PAL dalam mewujudkan ambisi membangun kapal selam secara mandiri (Refano, 2024).

Gambar 2. MoU RnD Pembangunan Kapal Selam Antara Kementerian Pertahanan RI dan Naval Group



Sumber: PT. PAL INDONESIA (2022)

Prancis sendiri sudah terkenal sebagai produsen alutsista yang memiliki kualitas tinggi, ini dibuktikan dengan meningkatnya ekspor alutsista Prancis hingga bisa menggeser Rusia dan pertama kalinya Prancis menjadi eksportir senjata nomor dua di dunia setelah AS (SIPRI, 2024). Ini juga menjadi

sejarah baru bagi Indonesia karena untuk kali pertama Indonesia akan memiliki pesawat tempur dan kapal selam dari Prancis yang tentu lebih modern dan canggih daripada yang sudah dimiliki Indonesia. Namun, ini juga menjadi tantangan kedepannya tentang kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia karena sebelumnya hanya menggunakan serta kapal selam dari Rusia, Jerman dan Korea Selatan serta pesawat tempur dari AS dan Rusia (Hastami and Abidin ,2023).

Dalam analisis menggunakan teori William Coplin, Prabowo Subianto berperan sebagai *bureaucratic influencer* yang tidak hanya mendorong pengadaan kapal selam kelas Scorpene untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia, tetapi juga memastikan adanya transfer teknologi untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Peranannya mencerminkan pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan strategis di sektor pertahanan.

2.1.2 Partisan Influencer

Partisan influencer atau partai yang mempengaruhi adalah partai-partai politik yang mempunyai peran untuk menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik pada umumnya menjadikan tuntutan-tuntutan masyarakat untuk menekan kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri yang akan atau belum diambil oleh para pengambil keputusan dengan mendelegasikan orang-orang yang dianggap mampu mempengaruhi dalam berbagai kebijakan. Partai politik di negara yang menganut sistem demokrasi cenderung memiliki keterbatasan dan dianggap sebagai tukang

stempel milik para pengambil keputusan. Namun tidak serta merta membuat posisi mereka lemah, para pengambil keputusan masih membutuhkan dukungan dari partai politik untuk melanggengkan kekuasaan, mempermudah dalam mengesahkan kebijakan, dan mendukung dalam pemilihan umum (Coplin, 2003).

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011). Lalu pada sistem demokrasi Indonesia para partai politik ini mendelegasikan orang-orang terbaiknya untuk menjabat sebagai legislator yang kemudian legislator ini disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka inilah yang sebagai representasi partai politik dan memiliki berbagai macam tugas dan wewenang yang salah satunya untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).

Partai Gerindra tentu akan selalu mendukung segala kebijakan yang ada di Kementerian Pertahanan, karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

sendiri adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Namun penulis hanya menemukan satu kader Partai Gerindra yang memberikan tanggapan tentang pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* yaitu, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus Juru Bicara Prabowo Subianto. Menurutnya dipilihnya Prancis oleh Prabowo bukan tanpa sebab, Prancis dirasa sangat sesuai dengan kebutuhan Indonesia mulai dari pesawat tempur *Rafale* dan kapal selam *Scorpene*. Ia juga mengatakan “Jadi, MoU yang diteken oleh Naval Group dengan PT PAL itu bertujuan ke depan PT PAL punya kemampuan yang sama dengan Naval Group untuk memproduksi kapal selam yang canggih seperti *Scorpene*,”. Pengadaan ini merupakan bentuk nyata komitmen Prabowo untuk menjaga wilayah udara dan laut secara maksimal (Dewi, 2022).

Meutya Hafid yang sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR akan terus meningkatkan alutsista milik TNI. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui pembelian 42 pesawat jet *Rafale* untuk memperkuat Angkatan Udara. Selain itu, pemerintah juga telah membeli enam kapal perang fregat kelas FREMM, dua kapal selam *Scorpene* untuk Angkatan Laut, serta akan menerima 500 Kendaraan Taktis Maung yang ditujukan untuk Angkatan Darat. Seluruh alutsista ini akan meningkatkan kemampuan prajurit di medan tempur (Muliawati, 2024).

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta turut memberikan respon atas kerja sama pertahanan Indonesia dan Prancis dalam pengadaan

pesawat tempur *Rafale* dan kapal selam *Scorpene*. “Kita berharap pembelian ini diikuti dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri,” ujarnya. Hal ini menjadi penting karena jumlah dana yang dikucurkan tidak sedikit, ia berharap transfer teknologi akan direncanakan dengan matang untuk pertahanan negara yang lebih baik lagi (Fraksi PKS, 2022).

Pada Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI, seluruh Fraksi Partai menyetujui rancangan undang-undang tentang kerja sama Indonesia dan Prancis. Hasil rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan menjadi “Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan,” pada Rapat Paripurna DPR RI di tanggal 30 September 2024 (CNN Indonesia 2024). Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa UU tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengadaan alutsista tertentu termasuk kapal selam *Scorpene*.

Sebagai kesimpulan, pengadaan dan transfer teknologi kapal selam *Scorpene* diharapkan mencapai target untuk memperkuat pertahanan maritim, meningkatkan kemandirian industri pertahanan melalui transfer teknologi, dan memenuhi kebutuhan alutsista canggih sesuai dengan tantangan strategis wilayah. Dukungan politik dari partai-partai besar, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024 tentang kerja sama pertahanan, mencerminkan keselarasan antara kebutuhan pemerintah dan aspirasi legislatif dalam memperkuat pertahanan nasional.

2.1.3 Interest Influencer

Interest influencer (Kepentingan yang mempengaruhi) adalah beberapa individu yang memiliki kesamaan kepentingan lalu bergabung dalam sebuah kelompok. Kelompok ini masih belum mempunyai kapasitas untuk bisa mendirikan sebuah partai politik. Tapi, kelompok ini masih sangat dibutuhkan untuk memberikan berbagai macam dukungan bagi para pengambil keputusan. *Interest influencer* terbagi menjadi dua tipe kepentingan yaitu: pertama, kepentingan ekonomi yang didasari untuk memperlancar bisnis dan mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah. Kedua, kepentingan non ekonomi yang didasari memiliki keterikatan etnis atau geografis diantara mereka. *Interest influencer* biasanya memiliki berbagai cara dalam menyampaikan kepentingannya seperti mengirim surat kepada para pengambil keputusan, *Bureaucratic Influencer* dan *Partisan Influencer*. Lalu menjanjikan dukungan keuangan atau bisa menarik dukungan keuangan yang berakibat pada banyak atau sedikitnya biaya kampanye bagi para pengambil keputusan dan partai politik (Coplin, 2003).

Pada studi kasus kerja sama antara Indonesia dan Prancis dalam pengadaan kapal selam kelas *Scorpene*, penulis memasukkan PT. Teknologi Militer Indonesia (TMI) sebagai kelompok *Interest influencer*.

PT. TMI sendiri adalah perusahaan swasta yang baru berdiri pada 14 Agustus 2020 lalu. Perusahaan ini memiliki spesifikasi di bidang pertahanan darat, laut, udara, inovasi dan teknologi, dalam profil perusahaan juga PT. TMI telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang

pertahanan seperti, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad. PT. LEN Industri, PT. Dirgantara Indonesia. Perlu diketahui bahwa PT. TMI pernah ramai disebut pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemenuhan Peralatan Pertahanan yang menelan biaya hingga Rp 1.760 triliun Karena ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai rekan kerja dari Kementerian Pertahanan (Nugroho 2024). Ini menjadi dugaan adanya kepentingan PT. TMI dalam proyek yang bernilai fantastis tersebut, belum lagi telah diketahui bahwa tiga dari empat komisaris ini merupakan rekan Prabowo semasa di Akademi Militer terdahulu. Ketiganya adalah Glenly Kairupan, Judi Magio Jusuf dan Angga Raka Prabowo yang juga tercatat sebagai kader Partai Gerindra (Putri, 2024). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak membantah jika ketiganya adalah kader Partai Gerindra, ia juga menambahkan "PT TMI itu berada di bawah yayasan Kemhan. Dan artinya bukan kepunyaan Kemhan secara langsung. Karena yayasan, itu sifatnya sudah swasta. Maka tidak ada salahnya kemudian ada Pak Glenly, ada Pak Yudi dan Pak Angga Raka yang memang masih pengurus Gerindra," (Aditya and Prabowo, 2021).

Kedudukan PT. TMI di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemenhan yang menjadikan statusnya sebagai perusahaan swasta tentu akan bekerja seperti swasta pada umumnya yaitu memiliki orientasi bisnis (Dwi, 2024). Hingga saat ini Kementerian Pertahanan RI dan PT. TMI sama-sama menepis berita tersebut dan menyebut tidak adanya kontrak pembelian alutsista. Kementerian Pertahanan RI mengatakan bahwa PT. TMI hanya menjadi pengawas terhadap kualitas alutsista (Putri, 2024).

PT. TMI yang sebagai perusahaan swasta tidak dapat langsung menemukan keterhubungan dengan keputusan atas kerja sama ini, namun karena pimpinan perusahaan adalah rekan Prabowo sekaligus kader Partai Gerindra yang menjadikan PT. TMI memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk kepentingan mereka sendiri.

2.1.4 Mass Influencer

Mass Influencer (Massa yang mempengaruhi) atau bisa disebut juga opini publik adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan tentunya akan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dengan memperkirakan dampaknya terhadap opini publik. *Mass Influencer* ini sangat diperlukan oleh para pengambil keputusan terutama jika negara itu menganut sistem demokrasi, karena *Mass Influencer* ini memiliki peran ketika adanya pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, informasi lebih terbuka yang dapat mempengaruhi opini publik dan para pengambil keputusan melihat ini sebagai celah untuk melakukan manipulasi agar dapat dukungan dalam setiap kebijakan yang diambil (Coplin, 2003)

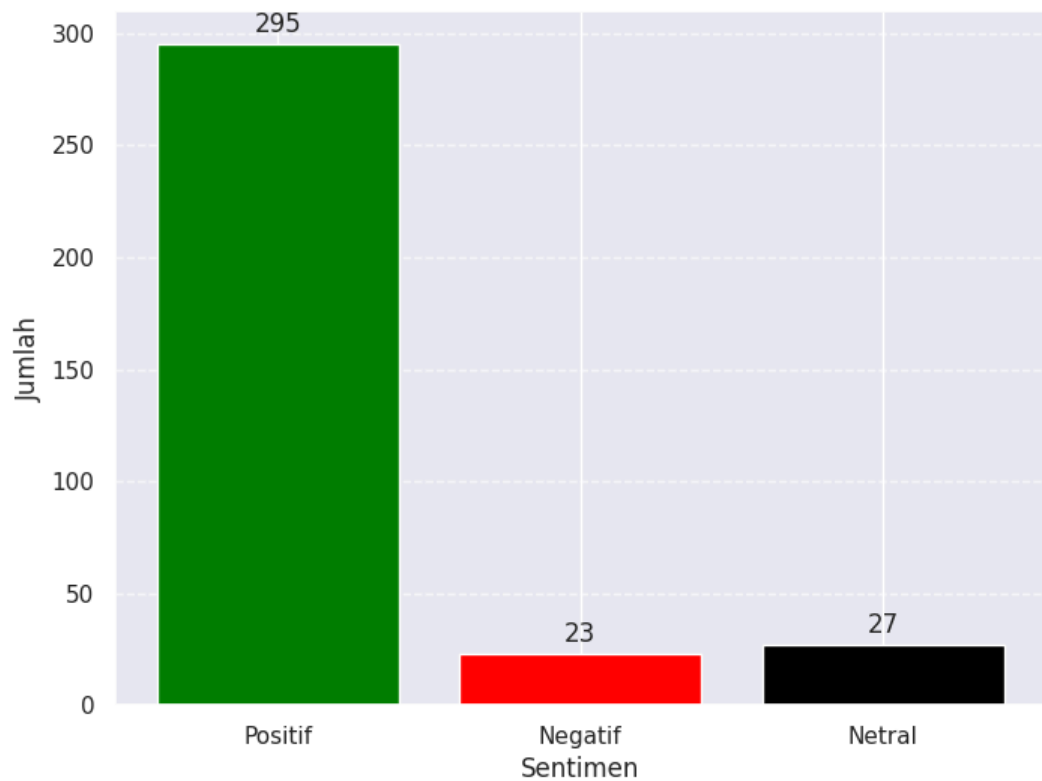
Dalam bukunya Coplin menyebutkan bahwa dalam membentuk opini publik peran media massa juga memiliki pengaruh dengan merangkai kata-kata dalam berita yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat. Namun, meskipun demikian *Mass Influencer* tidak bisa memberikan arahan yang konkret untuk para pengambil keputusan karena terbatasnya kemampuan dan wewenang (Coplin, 2003).

Tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan Bali pada April 2021 tentu menjadi duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat. Peristiwa ini makin menjadi pilu ketika telah diketahui bersama umur kapal yang sudah tua dan adanya kendala pada anggaran untuk mendukung alutsista milik TNI (Sadeli, 2021). Kondisi ini membangkitkan rasa solidaritas segenap masyarakat Indonesia dengan menggelar doa bersama di berbagai tempat sebagai bela sungkawa terhadap awak kapal yang gugur, seperti yang dilakukan di Surabaya. Doa bersama dan tabur bunga yang dilakukan oleh berbagai macam elemen lintas agama di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan alutsista terlebih yang sudah cukup berumur, karena itu adalah tembok paling depan dalam menghadapi ancaman dari luar (Riski, 2021). Rasa Solidaritas ini tidak hanya dengan bela sungkawa dan doa bersama, namun hingga munculnya gerakan donasi untuk membeli kapal selam yang digagas oleh anak-anak muda Masjid Jogokariyan. Sehubungan dengan hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa telah menyusun rencana induk untuk 25 tahun kedepan dalam sektor pertahanan (BBC, 2021).

Sampai saat ini penulis belum menemukan sumber yang spesifik tentang bagaimana tanggapan masyarakat yang dapat mempengaruhi kerja sama kapal selam *Scorpene* ini baik itu secara langsung, melalui media massa ataupun jurnal penelitian. Namun penulis melihat respon yang cukup ramai dari berbagai media sosial salah satunya adalah X. Penulis akhirnya mencoba menganalisis tweet tersebut menggunakan metode analisis sentimen klasifikasi *Naïve Bayes*. Penulis berhasil mengumpulkan tweet netizen X

mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Juli 2024 sebanyak 345 tweet dengan akurasi kebenaran sebesar 81 persen menggunakan *keyword* “Scorpene Indonesia”.

Gambar 3. Grafik Analisa Respon Netizen X



Sumber:Media Sosial X

Dari total sebanyak 345 tweet, ada 295 tweet positif, 23 tweet negatif dan 27 tweet netral. Seperti yang di tweet oleh akun @manghari500 “semoga alih teknologinya bisa berjalan lancar”. Namun perlu perlu menjadi perhatian bahwa data tersebut belum tentu valid seratus persen, karena adanya peran *Buzzer* untuk bisa membentuk opini publik dengan tujuan tertentu (Miqdad, 2024)

Media massa pun tak luput untuk menyajikan berita tentang kerja sama kapal selam *Scorpene* ini. seperti yang dilansir dari website navalnews.com “Bahwa TNI AL semakin jelas menunjukkan upaya untuk modernisasi alutsistanya yang telah tertinggal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didasari oleh ambisi sebagai pemain utama dalam kawasan regional” (Malufti 2024). Kemudian, dari website Lembagakeris.net menjelaskan bahwa “Kabar terkait kesiapan PT.PAL Indonesia (Persero) untuk dapat memproduksi kapal selam secara mandiri merupakan keniscayaan akan kemajuan Industri Pertahanan Indonesia. Realisasi dan kelanjutan dari upaya PT.PAL Indonesia (Persero) untuk dapat memproduksi *Indigenous Submarine* pertama untuk Indonesia adalah sebuah langkah besar yang patut untuk dinantikan perkembangannya.” (Keris, 2022).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mass influencers* mendukung adanya pengadaan ini, karena menyadari bahwa banyak alutsista yang sudah memasuki masa pensiun ditambah dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di Selat Bali sehingga masyarakat melakukan penggalangan dana untuk membeli kapal selam baru. Media massa juga tak menyajikan berita yang positif dan respon positif oleh netizen media sosial khususnya di platform X walaupun memiliki kemungkinan adanya *buzzer* dalam pembentukan opini.

BAB 3

KEPUTUSAN KERJA SAMA PENGADAAN KAPAL SELAM KELAS SCORPENE PRANCIS FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI & MILITER DAN KONTEKS INTERNASIONAL

Pada bab 2 telah dijelaskan bagaimana politik domestik melalui policy influencers dapat mempengaruhi kebijakan pengadaan kapal selam kelas Scorpene dengan beberapa pertimbangan dari para pengambil keputusan. Bab 3 akan menganalisis bagaimana kebijakan ini diambil oleh para pengambil keputusan dari faktor kemampuan ekonomi & militer dan konteks internasional.

3.1 Kemampuan Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer bagi suatu negara akan selalu di pertimbangkan dan menjadi faktor penting yang saling berkaitan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan suatu kebijakan negara. Antara ekonomi dan militer memiliki keselarasan, jika kemampuan ekonomi negara meningkat, maka kemampuan militer negara akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya. Meningkatnya kemampuan militer suatu negara tidak hanya berdampak pada keamanan dan pertahanan negara, namun juga akan menumbuhkan ekonomi negara dengan banyaknya perdagangan dan investasi yang masuk karena negara tersebut aman dari berbagai ancaman. Di sisi lain, meningkatnya ekonomi suatu negara dapat dijadikan sebagai pondasi yang kokoh dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan militer dan industri pertahanan (Coplin, 2003).

Peran politik domestik memang memiliki pengaruh yang besar, namun para pengambil keputusan akan melihat bagaimana keterbatasan ekonomi dan militer negaranya dan akan berhitung dengan cermat atas apa yang akan terjadi. Kemampuan ekonomi dan militer akan dijadikan sebagai daya tawar bagi suatu negara, jika kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut kuat, maka akan lebih mudah negara tersebut akan mempengaruhi negara lain yang lebih lemah demi mencapai kepentingan negaranya. Jika sebaliknya, negara yang lemah akan mencoba mencari keuntungan dengan negara yang lebih maju walaupun dengan banyak pengaruh dari negara yang lebih kuat (Coplin, 2003).

3.1.1 Kemampuan Ekonomi

Menurut Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara merupakan salah satu kunci dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin menilai bahwa dengan melihat total produk domestik bruto (PDB) suatu negara adalah hal yang paling mudah dalam melihat bagaimana kemampuan ekonomi suatu negara. Namun, PDB hanya menilai secara umum ekonomi suatu negara. Ada indikator yang lebih spesifik dalam melihat kemampuan ekonomi negara yaitu PDB per kapita (total pendapatan negara yang dibagi dengan total penduduk negara) yang dapat melihat dengan jelas apakah negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sektor perdagangan dan keuangan internasional juga memiliki peran yang cukup penting dalam faktor ekonomi. Coplin menjelaskan bahwa negara-negara di dunia tidak akan bisa terlepas dari sistem perdagangan dan keuangan internasional karena di dalamnya terdapat kegiatan ekspor, impor, aliran modal, investasi asing

langsung dan transaksi mata uang asing. kedua sistem tersebut biasanya diawali dengan adanya perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kepada semua pihak yang terlibat. Sistem ini cenderung akan bergerak mengikuti perkembangan dunia yang dinamis (Coplin, 2003).

Dalam faktor ekonomi ini Coplin membagi menjadi dua kriteria dalam melihat kekuatan dan kelemahan ekonomi negara (Coplin, 2003).

A. Kapasitas Produksi Barang dan Jasa

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Indonesia 2020-2023



Sumber :Badan Pusat Statistika (2024)

Dalam kapasitas ekonomi Indonesia dapat dilihat dengan besaran PDB yang berhasil dicapai. Ekonomi Indonesia sendiri cenderung stabil sejak 2019 hingga 2024 walaupun sempat ada pasang surut ketika Pandemi COVID-19 melanda (Badan Pusat Statistik, 2024). Dari data tersebut juga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Namun tetap berada di angka 5 persen yang sesuai dengan target

pemerintah (Sipayung, 2024). Meskipun Indonesia termasuk dalam 20 besar negara dengan PDB terbesar namun itu tidak serta merta memberikan keleluasaan untuk memberikan anggaran yang besar di sektor pertahanan. Sejak tahun 1999 hingga 2023 ini anggaran di sektor pertahanan tidak pernah menyentuh angka 1 persen dari total PDB Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi negara paling bawah di kawasan Asia Tenggara dalam rasio belanja pertahanan terhadap PDB, negara Asia tenggara lainnya sudah diatas 1 persen seperti Myanmar (3%), Singapura (2,8%), Brunei (2,4%), dan Kamboja (2,1%), hanya Indonesia satu-satunya pengeluaran untuk pertahanan tidak sampai 1 persen di Asia Tenggara (Javier, 2024).

Berdasarkan pola pertumbuhan PDB Indonesia, sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk terus mengalami pertumbuhan PDB di tahun-tahun berikutnya. Tren pertumbuhan positif serta kemampuan pemulihan yang cepat ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia cukup ideal dalam menunjang pembangunan industri pertahanan. Industri pertahanan yang maju dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui beberapa mekanisme, termasuk penciptaan nilai tambah, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar domestik dan ekspor, mendorong inovasi teknologi, serta membuka peluang kerja di sektor strategis. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing internasional dan menjadikan negara bagian dari rantai pasok global (Sabana, Curie, and Gindarsah, 2023).

Pengadaan kapal selam *Scorpene* masih belum dimulai, tentu belum ada dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah tentu

berharap dengan keputusan kerja sama dan transfer teknologi kapal selam ini dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi usaha produktif lainnya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 mewajibkan adanya transfer teknologi dalam setiap pengadaan alutsista dari luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk membangun kemandirian industri. Dengan pendekatan ini, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat bersaing di pasar global.

B. Ketergantungan pada perdagangan dan keuangan internasional

Salah satu hal yang masih menghambat Indonesia adalah adanya ketergantungan pada sistem perdagangan internasional. sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang menjadikan USD sebagai cadangan devisa negara. Hingga pada akhir Maret 2023 cadangan devisa Indonesia sebesar USD 145,2 miliar. Cadangan devisa dalam bentuk USD tentu akan digunakan untuk transaksi perdagangan internasional, bahkan penggunaan USD pernah mencapai titik tertingginya pada 2018 yaitu sebesar 95% untuk ekspor dan 76% untuk impor. Hal ini dapat mengakibatkan efek yang buruk bagi perekonomian Indonesia, karena menyebabkan jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap USD (Widyaiswara, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Kurs Dollar Amerika Terhadap Rupiah Tahun 2020-2023

2020	2021	2022	2023
Rp14.105	Rp14.269	Rp15.731	Rp15.416

Sumber : Badan Pusat Statistika (2024)

Meskipun begitu, penyumbang terbesar PDB Indonesia berasal dari sektor konsumsi rumah tangga. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,93 persen dan ekspor berkontribusi sebesar 21,37 persen dari total PDB Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Harapannya adalah dengan adanya kerja sama ini dapat menurunkan tingkat ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional, khususnya di bidang pertahanan. Karena ini sudah menjadi target dari PT. PAL agar tahun 2045 dapat membangun kapal selam selam secara mandiri dengan 100 persen komponen berasal dari Indonesia (Permana, 2023).

3.1.2 Kemampuan Militer

Coplin telah menjelaskan bahwa militer sebagai tembok pertahanan pertama milik negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja. Maka dengan negara memiliki kemampuan militer yang mumpuni baik dari teknologi, SDM, industri pertahanan akan dapat meningkatkan keamanan negaranya dan otomatis akan menjadi negara maju. Begitu juga sebaliknya, negara lemah biasanya hanya akan menjadi konsumen dari peralatan militer milik negara maju. Pada umumnya negara maju akan menggunakan kekuatan militernya sebagai daya tawar untuk menentukan kebijakan luar negerinya, hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan ancaman, perlindungan dan aliansi kepada negara yang lebih lemah (Coplin, 2003).

Coplin sendiri membagi menjadi tiga kriteria dalam faktor kemampuan militer (Coplin, 2003)

A. Kekuatan Militer

Dilansir dari *Global Fire Power* Indonesia menempati urutan 13 sebagai negara terkuat di bidang militer, tentu itu adalah hal yang membanggakan. Namun yang yang harus diketahui adalah *Global Fire Power* menempatkan urutan tersebut sesuai kuantitas personel dan alutsista sebagai parameternya alih-alih sesuai dengan kualitasnya. Jelas sekali alutsista tahun 70-an akan kalah dari segi apapun dengan alutsista modern. Hal inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 1,050,000 personel militer, dengan rincian sebanyak 400,000 tentara aktif, 400,000 tentara cadangan dan 250.000 paramiliter. Tentara aktif masih didominasi dari Matra Darat dengan 300,400 personel, Matra Laut 66,034 personel dan Matra Udara 30,100 personel (Global Fire Power, 2024) Menurut data dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan upaya pemenuhan MEF masih belum maksimal, ini ditandai dengan capaian alutsista TNI AL yang sampai saat ini baru memiliki 161 kapal perang permukaan dari target MEF sebanyak 262 kapal, 4 kapal selam dari target MEF sebanyak 12 kapal selam, 85 pesawat tempur dari target MEF sebanyak 160 pesawat tempur dan 503 kendaraan tempur marinir dari target MEF sebanyak 1.481 kendaraan tempur marinir (Fitri and Sanur, 2019). Sebagian besar dari kapal tersebut telah berumur lebih dari 20 tahun, tentu kemampuan dan teknologinya sudah tertinggal untuk era saat ini. Dengan umur, teknologi dan jumlah alutsista yang ada dirasa belum memadai dan perlu

adanya modernisasi untuk menjaga wilayah perairan Indonesia sebagai konsekuensi dari negara kepulauan (Mujiburrahman and Effendi, 2021).

"Kekuatan kapal selam akan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional, Oleh karena itu, kita harus menyatukan tekad untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global," Ucap KSAL Laksamana Muhammad Ali. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu membutuhkan kekuatan Angkatan laut yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan (Rizkia, 2024).

Pengadaan dan transfer teknologi kapal selam *Scorpene* merupakan langkah untuk menghadirkan alutsista maritim dengan spesifikasi canggih, daya tangkal yang signifikan dan mampu meningkatkan industri pertahanan, meskipun belum sepenuhnya mencapai jumlah kekuatan yang dianggap ideal.

B. Ketergantungan pada sumber-sumber negara lain

Sebagaimana sesuai dengan *masterplan* industri pertahanan yang telah dirumuskan, pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Langkah ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan alutsista dan upaya untuk memenuhi MEF 2024. Target dari pemerintah Indonesia adalah dapat membangun alutsista secara mandiri pada tahun 2029 sehingga bisa melepaskan diri dari ketergantungan alutsista dari negara lain (Aida, 2021).

Industri pertahanan Indonesia sendiri telah mampu membangun alutsista secara mandiri, seperti panser Pandur, panser Anoa, panser Komodo APC dan tank medium Harimau buatan PT. Pindad (Mawangi 2024). Lalu dari matra laut ada kapal *corvet* kelas Bung Karno yang dibangun oleh PT. Karimun Anugrah Sejati (Sari and Meiliana 2022) dan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter kelas Sampari buatan PT. PAL (Kementerian Pertahanan, 2021).

Meskipun begitu, menurut data yang dilansir oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), Indonesia menjadi negara dengan pengimpor alutsista yang cukup besar, sebanyak 1,8 persen dari total keseluruhan yang ada di dunia, ini menempatkan Indonesia dalam peringkat 17 sebagai negara terbesar untuk impor alutsista. Alutsista Indonesia didominasi berasal dari AS dengan persentase sebesar 20%, Belanda sebesar 18% dan Korea Selatan sebesar 16% (Aida, 2021).

Ada beberapa faktor yang menjadikan Indonesia masih bergantung dengan alutsista buatan negara lain yaitu, Pertama Indonesia masih belum memiliki pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan alutsista, khususnya alutsista yang dinilai strategis dan mematikan karena memerlukan proses pembuatan yang rumit dan kompleks, Kedua anggaran yang dirasa masih belum cukup karena kurang dari 1 persen PDB Indonesia (Widyatmoko, Almubaroq, and Saragih, 2022). Dengan adanya pengadaan dan transfer teknologi kapal selam *Scorpene* diharapkan bisa menjadi batu loncatan agar bisa melepaskan ketergantungan terhadap impor alutsista. Hal ini selaras dengan ambisi Defend ID bahwa tahun 2024 akan masuk sebagai 50 besar negara produsen alutsista (Sabana, Curie, and Gindarsah, 2023).

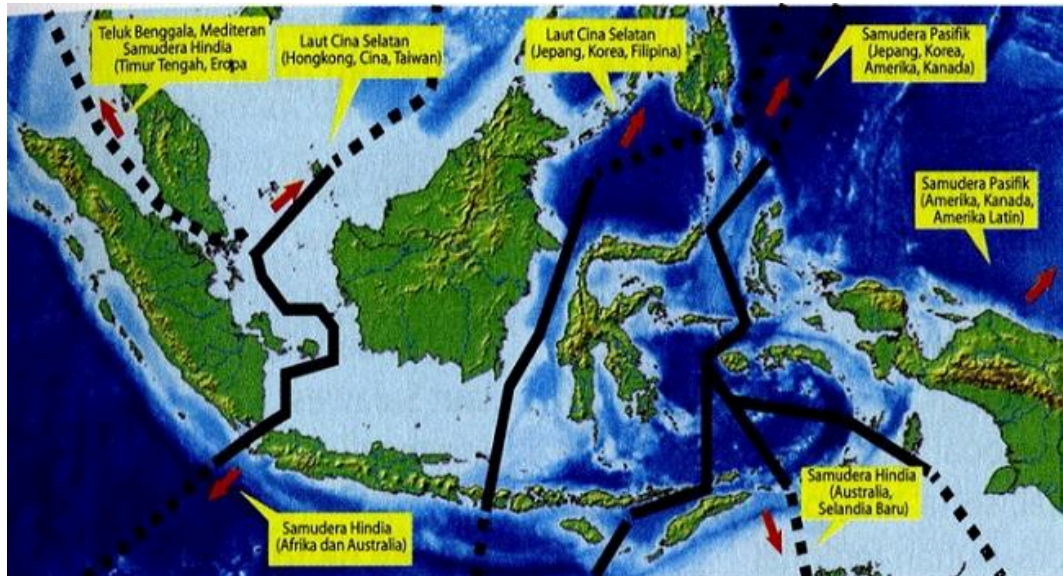
3.2 Konteks Internasional

Dinamika hubungan internasional antar negara yang kompleks dapat dipahami dengan bagaimana konteks internasional yang ada. Menurut penuturan Coplin dalam bukunya, bahwa ada tiga faktor dari konteks internasional yang dapat mempengaruhi keputusan dalam suatu kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik (Coplin, 2003).

3.2.1 Geografis

Geografi masih memiliki peran yang penting dalam politik luar negeri. Indonesia sendiri adalah negara maritim yang luas perairannya lebih luas jika dibandingkan dengan daratannya. Indonesia memiliki luas total kurang lebih 7,81 juta km², yang dari total luas tersebut sekitar 3,25 juta km² adalah lautan, kemudian 2,55 juta km² adalah luas dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas daratan di Indonesia hanya sekitar 2,01 juta km². Indonesia juga mempunyai sekitar 17.499 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan panjang 81.000 km. Dengan wilayah perairan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah berupa perikanan, minyak, gas alam dll. Di balik itu semua Indonesia juga terdapat jalur pelayaran yang menghubungkan antara wilayah Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan dengan wilayah Australia dan Asia Timur (Pratama, 2022).

Gambar 5. Peta Geografis Indonesia



Sumber: The Global Review (2014)

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis tentu tidak bisa terhindar dari gejolak geopolitik yang dinamis. Seperti klaim sepihak sekitar 80 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok dengan berlandaskan sejarah di masa lalu dan sebut sebagai *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus. Klaim ini menimbulkan ketegangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam (Djelantik, 2021). Kemudian pada 15 September 2021 secara mengejutkan terbentuknya pakta pertahanan AUKUS oleh Amerika Serikat bersama Britania Raya dan Australia. pakta pertahanan AUKUS dianggap sebagai respon atas hegemoni dan klaim sepihak Tiongkok di perairan Laut Tiongkok Utara. Kesepakatan pertama AUKUS setidaknya akan membantu Australia dalam membangun beberapa unit kapal selam bertenaga nuklir. Hal itu bisa merubah

keamanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik karena berpotensi negara yang berada di kawasan tersebut akan berlomba-lomba membuat senjata nuklir (Delanova, 2021). Amerika Serikat baru-baru ini juga terlihat meningkatkan aktivitas militernya di kawasan Asia Timur, hal ini dapat dilihat dengan adanya latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berlangsung pada 4 Maret hingga 14 Maret (Azzahra, 2024). Lalu ada juga pembentukan komando baru dengan Jepang yang akan terealisasi pada Maret 2025 (Natalia, 2024). Selain itu Amerika Serikat juga meningkatkan aktivitas militernya di kawasan ASEAN dengan mengadakan latihan gabungan dengan nama *Cobra Gold* yang akan diikuti sekitar 30 negara seperti, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Latihan gabungan ini adalah salah satu yang terbesar di kawasan Indo-Pasifik (Ipdefenseforum, 2024).

Dengan adanya pergolakan geopolitik yang telah terjadi kawasan Indo-Pasifik, tentu Indonesia sangat memerlukan sistem pertahanan yang canggih dan mumpuni. TNI AL sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan wilayah laut Indonesia harus memiliki kapal selam yang canggih agar dapat menjaga wilayah laut Indonesia dengan maksimal (Marsetio and Ritonga, 2018). Menindaklanjuti atas kebutuhan alutsista pertahanan khususnya di wilayah perairan, Kementerian Pertahanan RI mulai meningkatkan kemampuan TNI AL dengan pengadaan berbagai macam alutsista seperti, pengadaan dua unit kapal perang permukaan berjenis *Frigate* buatan Fincantieri S.p.A dari Italia (Kementerian Pertahanan, 2024), kemudian pengadaan kapal selam kelas *Scorpene* buatan Naval Group dari Prancis

(Kementerian Pertahanan, 2024). Pengadaan ini diharapkan dapat memberikan *deterrence effect* bagi pihak-pihak yang ingin melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dan sebagai wujud dari modernisasi alutsista serta transformasi TNI AL menuju *World Class Navy* yang dapat dipercaya untuk bersiap dalam segala situasi di wilayah regional maupun global (Marsetio and Ritonga, 2018).

3.2.2 Ekonomi

Indonesia tentu menjadi aktor penting dalam kawasan ini. Ini bisa dilihat bahwa Indonesia memberikan kontribusi lebih dari sepertiga total PDB ASEAN dan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk ke dalam anggota G20. Dari total sekitar 680 juta jiwa yang tinggal di kawasan ASEAN, 40 persen diantaranya berada di Indonesia. Tentu ini menjadikan Indonesia sebagai mesin utama perekonomian di kawasan ini (HSBC, 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri pertahanan global. Pemerintah Indonesia melalui Defend ID telah menetapkan visi ambisius untuk masuk ke dalam 50 negara produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbesar di dunia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan domestik tetapi juga memperkuat daya saing industri pertahanan nasional di pasar internasional (Hidranto, 2022). Dalam upaya ini Pemerintah Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi landasan hukum yang mengatur kewajiban transfer teknologi dalam setiap pengadaan alutsista

dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan program offset, di mana mitra internasional harus menginvestasikan sebagian dari nilai kontrak ke dalam industri pertahanan domestik (Badan Pemeriksa Keuangan 2012).

Kementerian Pertahanan, bersama dengan BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri, dan PT Dirgantara Indonesia, telah bekerja sama untuk mempercepat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Salah satu contoh nyata adalah program pengadaan kapal selam kelas Scorpène dari Prancis, yang melibatkan transfer teknologi untuk mendukung kemandirian produksi di masa depan. (Sabana, Curie, and Gindarsah, 2023). Pembangunan ini juga diharapkan akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi alutsista yang dibutuhkan oleh negara dan kedepannya dapat memasok alutsista itu ke negara lain (Purwa, 2024). Secara otomatis ini akan memunculkan ekosistem ekonomi berantai pada banyak industri lainnya yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi Indonesia (Ali, 2023).

Dengan adanya proyek kerja sama dan transfer teknologi pembangunan kapal selam Scorpene ini diharapkan dapat membantu program Indonesia sebagai poros maritim dunia dan masuk sebagai 50 besar negara produsen alutsista dengan mengembangkan industri pertahanan.

3.2.3 Politik

Visi politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tentu menjadi hal yang sangat strategis untuk menancapkan pengaruh maritim Indonesia, bukan sekedar di tingkat

regional, namun ke tingkat global. Untuk mewujudkan visi politik ini tentu Indonesia memerlukan pondasi kuat yang salah satunya adalah memiliki alutsista yang mumpuni (Chadhafi, 2021). Kapal selam adalah salah satu alutsista yang memiliki daya gerak tinggi bagi negara yang ingin melanggar kedaulatan negara (Darmawan, Alkadrie, and Sudirman, 2020). Kapal selam akan menjadi elemen kunci dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan dan memastikan keamanan di wilayah perairan Indonesia serta yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, diperlukan tekad bersama untuk membangun TNI Angkatan Laut yang modern, memiliki daya tangkal yang kuat di tingkat kawasan, dan mampu berperan di kancah global (Rizkia, 2024).

Dengan adanya kapal selam *Scorpene* diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ranah diplomasi maritim. Dengan daya gentar yang signifikan, kapal selam ini mendukung Indonesia untuk menjalankan peran strategis di kawasan, termasuk menjaga stabilitas di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti Laut Cina Selatan. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga memperkokoh pengaruh Indonesia sebagai negara maritim yang mampu berkontribusi pada keamanan regional dan global (Rizkia, 2024)

Pada dasarnya hubungan antara Indonesia dan Prancis telah ada sejak 2012 yang bisa dilihat dengan adanya *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD). IFDD sendiri adalah sebuah forum yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk membahas terkait pertahanan. Lalu pada 28 Juni 2021 dibentuk kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis yaitu *Defense Cooperation Agreement* (DCA) sebagai bentuk penguatan hubungan kedua negara (Utomo,

Sudrajat, and Halkis, 2023). Selain pembelian 42 pesawat tempur *Rafale*, Indonesia juga membeli 2 unit kapal selam kelas *Scorpene* dengan skema *transfer of technology* dan memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di PT. PAL (PT. PAL, 2022).

Kemitraan pertahanan antara Indonesia dan Prancis yang terjalin melalui Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) dan Defense Cooperation Agreement (DCA) mencerminkan komitmen kedua negara untuk saling mendukung dalam pengembangan teknologi dan penguatan sumber daya manusia, seperti yang dilakukan melalui PT. PAL. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang pertahanan, tetapi juga memperkuat pengaruhnya sebagai negara maritim yang berkontribusi pada keamanan regional dan global.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan Indonesia dalam kerja sama dengan Prancis untuk pengadaan kapal selam kelas Scorpene pada tahun 2024. Dengan menggunakan teori *Decision Making* dari William D. Coplin, penelitian ini menganalisis tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional.

Faktor Politik Domestik ditandai dengan adanya aktor-aktor yang dapat memberikan pengaruhnya dalam setiap kebijakan luar negeri suatu negara yaitu *Policy Influencer*. *Policy Influencer* menurut Coplin dibagi menjadi empat jenis. Pertama, *Bureaucratic Influencer* yaitu Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI yang memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kebijakan di sektor pertahanan. Kedua, *Partisan influencer* sebagai partai politik. Beberapa partai telah menunjukkan dukungannya dan juga semua Fraksi partai di DPR menyetujui kerja sama dengan Prancis di sektor pertahanan. Ketiga, *Interest Influencer* adalah kelompok yang memiliki kepentingan yaitu PT. TMI yang ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto dalam proyek di Kementerian Pertahanan dan juga petinggi PT. TMI sendiri adalah kader partai Gerindra. Keempat, *Mass Influencer* adalah respon dari masyarakat menunjukkan dukungan terhadap pengadaan kapal selam, terutama setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Opini publik yang

positif dan dukungan dari media massa memperkuat kebutuhan dalam pengadaan kapal selam ini.

Faktor kemampuan ekonomi menjadi penting, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami penurunan pada saat pandemi COVID-19 melanda, namun selebihnya tren pertumbuhan ini selalu positif dengan adanya peningkatan PDB perkapita. Meskipun begitu alokasi anggaran pertahanan tergolong masih rendah. Ketergantungan pada perdagangan internasional dapat menjadi tantangan untuk segera mencapai kemandirian ekonomi. Faktor kemampuan militer. Meskipun Indonesia masuk sebagai negara dengan tingkat kekuatan militer yang besar versi *Global Fire Power* itu hanyalah dilihat secara kuantitas. Perlu adanya modernisasi dan meningkatkan kemandirian atas ketergantungan pada impor alutsista. Pembangunan kapal selam ini dengan skema *transfer of technology* diharapkan sebagai pondasi dasar agar dapat membangun kapal selam itu secara mandiri di masa yang akan datang.

Faktor konteks internasional juga telah dipertimbangkan dari segi letak geografis Indonesia yang sangat strategis menuntut untuk Indonesia lebih aktif dalam menjaga keamanan wilayah perairannya demi kepentingan nasional. Kerja sama dengan Prancis diharapkan dapat semakin menguatkan hubungan diplomatik kedua negara di berbagai bidang termasuk ekonomi yang mana Indonesia memiliki target menjadi 50 besar negara produsen alutsista terbesar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang pertahanan, tetapi juga memperkuat pengaruhnya sebagai negara maritim yang berkontribusi pada keamanan regional dan global.

4.2 Rekomendasi

1. Peningkatan industri pertahanan dalam negeri: Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan peluang dari kerja sama ini, yang diharapkan dapat membangun kapal selam secara mandiri, sehingga bisa menghasilkan kapal selam yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta memiliki potensi untuk mengekspornya di masa depan.
2. Peningkatan anggaran pertahanan: Pemerintah perlu memperhatikan kondisi alutsista yang sudah berumur, sehingga perlu adanya modernisasi yang tentu perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran untuk pertahanan tanpa mengorbankan anggaran di sektor lainnya.
3. Pengawasan dan evaluasi berkala: Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan kapal selam ini berhasil dengan menunjuk tim yang kompeten dan bertanggung jawab agar setiap kendala dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
4. Penelitian selanjutnya: Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bisa membahas dampak ekonomi dan implementasi ToT ketika pembangunan kapal selam telah dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sultan. 2024. "DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista." Nasional tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1879014/dpr-rapat-tertutup-dengan-kemenhan-dan-tni-bahas-anggaran-hingga-alutsista>.
- Aditya, Nicholas R., and Dani Prabowo. 2021. "Gerindra Benarkan 3 dari 4 Empat Komisaris PT TMI adalah Kader Partai." KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/02/15240131/gerindra-benarkan-3-dari-4-empat-komisaris-pt-tmi-adalah-kader-partai>.
- Aida, Ade N. 2021. "Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara." *Budget Issue Brief Politik dan Keamanan* 1, no. 8 (Mei): 1-2.
- Alausath, Albert. 2024. "Terungkap 2 Alasan Indonesia Lebih Pilih Beli Scorpene dan Batalkan Kontrak 6 Kapal Selam Buatan Korsel." Zona Jakarta. <https://www.zonajakarta.com/nasional/67312860187/terungkap-2-alasan-indonesia-lebih-pilih-beli-scorpene-dan-batalkan-kontrak-6-kapal-selam-buatan-korsel?page=2>.
- Alausath, Albert. 2024. "Prancis Terang-Terangan Ingin Ciptakan Poros Baru di Indo-Pasifik Dengan Indonesia Untuk Lepaskan Diri dari Negara Adidaya." Zona Jakarta. <https://www.zonajakarta.com/nasional/67313049458/prancis-terang-terangan-ingin-ciapkan-poros-baru-di-indo-pasifik-dengan-indonesia-untuk-lepaskan-diri-dari-negara-adidaya>.
- Ali, Alman H. 2023. "Menantikan Realisasi Program Kapal Selam Indonesia." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230223124849-14-416335/menantikan-realisisi-program-kapal-selam-indonesia>.
- Amalia. 2024. "PT PAL Indonesia Paparkan Sederet Inovasi dan Kesiapan Produksi Kapal Selam kepada KKIP." Kabar BUMN. <https://www.kabarbumn.com/trending/114842802/pt-pal-indonesia-paparkan-sederet-inovasi-dan-kesiapan-produksi-kapal-selam-kepada-kkip>.
- Anggara, Artha S. 2024. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Pertahanan Dengan Prancis Tahun 2020-2024." *Diplomacy and Global Security Journal* 01, no. 01 (Oktober): 577-593.
- "Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Mandenas Dorong Pemerintah Modernisasi Alutsista." 2021. indonesiadefence.com. <https://indonesiadefence.com/anggota-komisi-i-dpr-fraksi-gerindra-yan-permandes-dorong-pemerintah-modernisasi-alutsista/>.

- Arsilan, Rifki. 2023. "KSAL Bocorkan Spesifikasi Kapal Selam yang Layak Perkuat TNI AL di Masa Mendatang." Viva. <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1664523-ksal-bocorkan-spesifikasi-kapal-selam-yang-layak-perkuat-tni-al-di-masa-mendatang?page=all>.
- Asmara, Chandra G. 2021. "Mengintip Masterplan Alutsista A La Prabowo, Seperti Apa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210517144504-4-246019/mengintip-masterplan-alutsista-a-la-prabowo-seperti-apa>.
- Azzahra, Nabila. 2024. "Latihan Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat Akan Fokus ke Ancaman Nuklir Korea Utara." dunia.tempo.co/. <https://dunia.tempo.co/read/1838930/latihan-militer-korea-selatan-dan-amerika-serikat-akan-fokus-ke-ancaman-nuklir-korea-utara>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 1999. "Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri." Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2002. "UU No. 3 Tahun 2002." Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan." peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012#:~:text=MATERI%20POKOK%20PERATURAN&text=Undang%2DUndang%20ini%20mengatur%20tentang,berkembang%20dan%20dimanfaatkan%20secara%20optimal>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. "Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama." Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177340/permenhan-no-19-tahun-2012>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q)." Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>.

- Bakrie, Connie R. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BBC. 2021. "KRI Nanggala 402: Dari patungan di masjid beli kapal selam baru, besarnya antusias rakyat hingga desakan revolusi anggaran alutsista RI naik 'tujuh kali lipat.'" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56917804>.
- Bunaiya. 2022. "PDI Perjuangan Dukung Presiden Perkuat Alutsista TNI." [rri.co.id](https://www.rri.co.id). <https://www.rri.co.id/nasional/51147/pdi-perjuangan-dukung-presiden-perkuat-alutsista-tni>.
- Cahyasari, Wulan, and Dedik F. Suhermanto. 2023. "KERJA SAMA AUSTRALIA DAN PERANCIS DALAM PROYEK PEMBUATAN KAPAL SELAM." *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 1 (November): 141-158.
- Chadhafi, Mochammad I. 2021. "Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim dalam rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia." *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. 2 (Agustus): 206-214.
- CNN Indonesia. 2024. "DPR Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Prancis hingga UEA." CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930231448-32-1150110/dpr-sahkan-ruu-kerja-sama-pertahanan-ri-dengan-prancis-hingga-uea#:~:text=DPR%20Sahkan%20RUU%20Kerja%20Sama%20Pertahanan%20RI%20dengan%20Prancis%20hingga%20UEA,-tim%20%7C%20CNN%20Indonesia&tex>.
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional suatu telaah teoritis*. Bandung, Jawa Barat: Sinar Baru Algesindo.
- Darmawan, Wawan B., Jafar Alkadrie, and Arfin Sudirman. 2020. "Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 1, no. 3 (Januari): 287-310.
- Dayat. 2022. "Golkar Sebut Industri Pertahanan Indonesia Siap Produksi Pesawat Tempur, Torpedo hingga Bom Udara." [soksineews.com](https://www.soksineews.com). <https://www.soksineews.com/Nasional/Golkar-Sebut-Industri-Pertahanan-Indonesia-Siap-Produksi-Pesawat-Tempur,-Torpedo-hingga-Bom-Udara->.
- Delanova, Mariane O. 2021. "DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK." *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 2 (12): 259-285.

- Dewi, Santi. 2022. "Kemenhan: Harga Kontrak 6 Jet Tempur Rafale Mencapai US\$1,1 miliar." *idntimes.com*.
https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kemenhan-harga-kontrak-6-jet-tempur-rafale-mencapai-us11-miliar?page=all&_gl=1*1kmuuhj*_ga*OGJsaVRrQmxCaVdmWFowTFc0T3lMOE1DZk8zNUE5eW15MUdmbXJ2WEtrOEIhbm5WYkJGQ0NsYWVpN0t0MTNlbQ..*_ga_TT180KERFB*MTczNjQ1Nj.
- Djelantik, Sukawarsini. 2021. "KEKUATAN NASIONAL TIONGKOK DALAM SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN." *1 Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (Agustus): 292-319.
- DPR RI. 2022. "TB Hasanuddin Dukung Pengembangan Terobosan Kapal Selam Demi Pertahanan Negara." *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41068/t/TB+Hasanuddin+Dukung+Pengembangan+Terobosan+Kapal+Selam+Demi+Pertahanan+Negara>.
- Dwi, Andika. 2024. "PT TMI Dicap Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista, Siapa Pemiliknya?" *Tempo.co*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/pt-tmi-dicap-anies-ordal-prabowo-di-proyek-alutsista-siapa-pemiliknya--99201>.
- Febrianto, Achmad. 2014. "ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN DALAM UPAYA PEMBEBASAN IRIAN BARAT TAHUN 1961-1962." *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (Oktober): 286-291.
- Fitri, Aulia, and Debora Sanur. 2019. "Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF)." *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11, no. 22 (November): 25-30.
- Fraksi PKS. 2022. "Politisi PKS Ingatkan Pemerintah agar Perkuat Industri Pertahanan Dalam Negeri." *fraksi.pks.id*.
<https://fraksi.pks.id/2022/02/14/politisi-pks-ingatkan-pemerintah-agar-perkuat-industri-pertahanan-dalam-negeri/>.
- Gerindra. 2023. "Sugiono Ungkap Tujuan Dibentuknya Panja Kemanan Laut." *gerindra.id*.
<https://gerindra.id/2023/09/20/sugiono-ungkap-tujuan-dibentuknya-panja-keamanan-laut/>.
- Global Fire Power. n.d. "2024 Indonesia Military Strength." *Global Firepower*. Accessed September 3, 2024.
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia.

- The Global Review. 2014. "Membaca Poros Maritim Dunia dan Posisi Silang dari Perspektif Geopolitik." The Global Review. <https://theglobal-review.com/membaca-poros-maritim-dunia-dan-posisi-silang-dari-perspektif-geopolitik/>.
- Hakim, Syaiful. 2022. "PT. PAL gandeng Naval Group Prancis kembangkan baterai lithium kapal selam - ANTARA News Jawa Timur." Antara Jatim News. <https://jatim.antaranews.com/berita/651797/pt-pal-gandeng-naval-group-prancis-kembangkan-baterai-lithium-kapal-selam>.
- Hardita, Yayabg. 2024. "Naval Group Mengunjungi PT PAL untuk Kolaborasi dalam Pembangunan Kapal Selam Jenis Scorpene Evolved Pertama di Indonesia." zonajakarta.com. <https://www.zonajakarta.com/internasional/67313022363/naval-group-mengunjungi-pt-pal-untuk-kolaborasi-dalam-pembangunan-kapal-selam-jenis-scorpene-evolved-pertama-di-indonesia>.
- Hastami, Novitasari W., and Ali Z. Abidin. 2023. "Studi Kebijakan dalam Pengadaan Dassault Rafale sebagai Alutsista Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 7, no. 2 (April): 389-400.
- Hidranto, Firman. 2022. "Skema Melepaskan Ketergantungan pada Mata Uang Tertentu." indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6375/skema-melepaskan-ketergantungan-pada-mata-uang-tertentu?lang=1>.
- Hidranto, Firman. 2022. "Defend ID Menuju Peringkat 50 Besar Dunia." Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4767/defend-id-menuju-peringkat-50-besar-dunia?lang=1>.
- HSBC. 2024. "Indonesia sebagai Gerbang Utama Pasar ASEAN | HSBC Indonesia." HSBC Business. <https://www.business.hsbc.co.id/id-id/insights/growing-my-business/asean-resiliency-and-robust-growth-make-it-fertile-ground-for-international-expansion>.
- Ihsanuddin, and Icha Rastika. 2020. "Prabowo Ingin Impor Alutsista, Jokowi Akan Bahas di Rapat Terbatas." Nasiona.Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/11480361/prabowo-ingin-impor-alutsista-jokowi-akan-bahas-di-rapat-terbatas?page=all&utm_source=chatgpt.com.
- Indonesiadefense. 2021. "Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Mandenas Dorong Pemerintah Modernisasi Alutsista." <https://indonesiadefense.com/>. <https://indonesiadefense.com/anggota-komisi-i-dpr-fraksi-gerindra-yan-permandes-dorong-pemerintah-modernisasi-alutsista/>.

- Indrawati, and Agung Y. Nugroho. 2018. "PENERAPAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MELALUI DIPLOMASI MARITIM." *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, no. 20 (Desember): 14-26.
- Ipdefenseforum. 2024. "Thailand dan A.S. akan mengadakan latihan militer tahunan bersama pasukan dari 30 negara – Indo-Pacific Defense Forum." Indo-Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/id/2024/02/thailand-dan-a-s-akan-mengadakan-latihan-militer-tahunan-bersama-pasukan-dari-30-negara/>.
- Javier, Faisal. 2024. "Bagaimana Rasio Anggaran Pertahanan terhadap PDB Indonesia? - Data Tempo.co." Data. <https://data.tempo.co/data/1818/bagaimana-rasio-anggaran-pertahanan-terhadap-pdb-indonesia>.
- Kementerian Pertahanan. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. 2021. "Menhan Prabowo Luncurkan Kapal KCR Kelima Karya Anak Bangsa." kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2021/12/05/menhan-prabowo-luncurkan-kapal-kcr-kelima-karya-anak-bangsa.html>.
- Kementerian Pertahanan. 2024. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2024/04/04/kemhan-ri-tandatangani-kontrak-kerja-sama-pengadaan-kapal-untuk-perkuat-tni-al.html>.
- Kementerian Pertahanan. 2024. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2024/04/17/perkuat-pertahanan-maritim-nasional-kemhan-ri-tandatangani-kontrak-pengadaan-kapal-kelas-fremm-dengan-italia.html>.
- Keris, Lembaga. 2022. "Menanti Kapal Selam Asli Buatan PT. PAL Indonesia." Lembaga Kajian Pertahanan Strategis "KERIS" -. <https://lembagakeris.net/menanti-kapal-selam-asli-buatan-pt-pal-indonesia/>.
- Lestari, Putri P., Siti M. Rohmah, and Aditya Ramadhani. 2024. "KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI INDONESIA." *Indonesian Journal of Political Studies* 4, no. 1 (April): 40-53.
- Limanseto, Haryo. 2024. "Menko Airlangga Beberkan Keberhasilan Perekonomian Indonesia di Hadapan Para Pemimpin Global dalam Nikkei Forum 2024." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5791/menko-airlangga-beberka>

n-keberhasilan-perekonomian-indonesia-di-hadapan-para-pemimpin-global-dalam-nikkei-forum-2024.

- Malufti, Fauzan. 2024. "Indonesia Moving Closer to 'Scorpene Evolved' Submarine Deal." *Naval News*.
<https://www.navalnews.com/naval-news/2024/03/indonesia-moving-closer-to-scorpene-evolved-submarine-deal/>.
- Marsetio, and Rajab Ritonga. 2018. "Representasi Kapal Selam Indonesia dalam Perspektif Pertahanan Regional." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (Januari): 5-12.
- Mawangi, Genta T. 2023. "Kasal: Pengadaan kapal selam masih jadi prioritas TNI AL." *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/3753168/kasal-pengadaan-kapal-selam-masih-jadi-prioritas-tni-al>.
- Mawangi, Genta T. 2024. "HUT ke-2, Defend ID berambisi unggul ST Engineering Singapura." *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/4078059/hut-ke-2-defend-id-berambisi-ungguli-st-engineering-singapura>.
- Mawangi, Genta T. 2024. "Kemenhan serahkan 769 alpahankam buatan dalam negeri untuk TNI." *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/4371591/kemenhan-serahkan-769-alpahankam-buatan-dalam-negeri-untuk-tni>.
- Meidiani, Sri Ayu I. 2018. "KERJASAMA INDONESIA - KOREA SELATAN DALAM INDUSTRI KAPAL SELAM INDONESIA TAHUN 2011-2016." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6 (3): 1215-1230.
- Miqdad. 2024. "Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (Juni): 689-698.
- Mujiburrahman, and Satrio A. Effendi. 2021. "Urgensi Percepatan Modernisasi Alutsista TNI AL." *Politik dan Keamanan Budget Issue Brief* 1, no. 7 (Mei): 1-2.
- Muliawati, Anggi. 2024. "Komisi I DPR: Super Hercules C130J A-1344 Bukti Komitmen Perkuat Alutsista." *News.detik.com*.
<https://news.detik.com/berita/d-7157996/komisi-i-dpr-super-hercules-c130j-a-1344-bukti-komitmen-perkuat-alutsista>.
- Natalia, Desca L. 2024. "Beijing kecam komando militer baru AS di Jepang." *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/4225387/beijing-kecam-komando-militer-baru-as-di-jepang>.
- Nugroho, Rosseno A. 2024. "Menilik Sepak Terjang PT TMI, Perusahaan Milik Kroni Prabowo." *CNBC Indonesia*.

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240110145844-4-504475/menilik-sepak-terjang-pt-tmi-perusahaan-milik-kroni-prabowo>.
- Permana, Ikhsan P. 2023. "Target Ekspor Kapal Selam 100% Lokal di 2045, PT PAL Harus Lewati Dulu 4 Fase." Ekbis Sindonews.com. <https://ekbis.sindonews.com/read/1094069/34/target-ekspor-kapal-selam-100-lokal-di-2045-pt-pal-harus-lewati-dulu-4-fase-1683716738>.
- Pertahanan, Peraturan M. 2016. "Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial." <https://peraturan.bpk.go.id/>.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/178296/permenhan-no-13-tahun-2016>.
- Pradewo, Bintang. 2020. "PDIP Dukung Sikap Tegas Pemerintah Soal Nantuna." JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/nasional/01249833/pdip-dukung-sikap-tegas-pemerintah-soal-nantuna>.
- Prasetyawati, Ayu D. 2021. "National Oceanographic." National Oceanographic. <https://national-oceanographic.com/article/strategi-pengembangan-industri-maritim-dan-industri-perkapalan-nasional-sebagai-poros-maritim-dunia>.
- Prasetyo, Hery. 2024. "Seserius Ini Persiapan Indonesia Membangun 2 Kapal Selam Scorpene, Sampai India Kepincut untuk Terlibat." zonajakarta.com. Seserius Ini Persiapan Indonesia Membangun 2 Kapal Selam Scorpene, Sampai India Kepincut untuk Terlibat.
- Pratama, Taufik I. 2023. "Kapal Selam Sang Penjaga Wilayah Maritim Indonesia." djkn.kemenkeu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/16069/Kapal-Selam-Sang-Penjaga-Wilayah-Maritim-Indonesia.html>.
- PT. PAL. 2022. "Gandeng Naval Group, PAL Siap Perkuat Pertahanan Maritim." Gandeng Naval Group, PAL Siap Perkuat Pertahanan Maritim. <https://www.pal.co.id/gandeng-naval-group-pal-siap-perkuat-pertahanan-maritim/>.
- Purwa, Widi. 2024. "Dave Laksono: Kekuatan Pertahanan Nasional Harus Ditopang Kemandirian Industrinya." golkarpedia.com. <https://golkarpedia.com/dave-laksono-kekuatan-pertahanan-nasional-harus-ditopang-kemandirian-industrinya/>.
- Puspita, Melynda D. 2024. "Daftar Alutsista yang Dibeli Prabowo Subianto Sejak Menjabat Sebagai Menhan." tempo.co.

- <https://www.tempo.co/sains/daftar-alutsista-yang-dibeli-prabowo-subianto-sejak-menjabat-sebagai-menhan-98758>.
- Putra, Erik P. 2024. "Diplomasi Militer Prabowo dan Modernisasi Alutsista Berjalan Beriringan." *Republika*.
<https://news.republika.co.id/berita/slmttg484/diplomasi-militer-prabowo-dan-modernisasi-alutsista-berjalan-beriringan>.
- Putri, Riani S. 2024. "Klaim Tak Pernah Teken Kontrak dengan PT TMI di Proyek Alutsista, Kemenhan: Hanya Ahli Pengawas." *tempo.co*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/klaim-tak-pernah-teken-kontrak-dengan-pt-tmi-di-proyek-alutsista-kemenhan-hanya-ahli-pengawas-87977>.
- Rachmat, Angga N. 2016. "Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia." *Jurnal Transformasi Global* 1, no. 2 (Agustus): 199-212.
- Refano, Vino. 2024. "Indonesia Segera Bangun Scorpene, PT PAL Gercep Siapkan 3 Fasilitas Termasuk Pabrik Senjata Kapal Selam." *zonajakarta.com*.
<https://www.zonajakarta.com/nasional/67312381379/indonesia-segera-bangun-scorpene-pt-pal-gercep-siapkan-3-fasilitas-termasuk-pabrik-senjata-kapal-selam>.
- Riski, Petrus. 2021. "Masyarakat Surabaya Gelar Doa Bersama untuk Awak KRI Nanggala." *voaindonesia.com*.
<https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-surabaya-gelar-doa-bersama-untuk-awak-kri-nanggala/5866249.html>.
- Rizkia, Riana. 2024. "KSAL Sebut Kapal Selam Kunci Utama Kekuatan TNI AL di Perairan Indonesia." *nasional.sindonews*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1453541/14/ksal-sebut-kapal-selam-kunci-utama-kekuatan-tni-al-di-perairan-indonesia-1726045759>.
- Rizkia, Zulaika. 2023. "Nagapasa Class Disinggung Kemenhan, Ini Kisah Kapal Selam Pesanan Indonesia yang Bikin Korsel Rugi Bandar." *Zona Jakarta*.
<https://www.zonajakarta.com/nasional/67310125827/nagapasa-class-disinggung-kemenhan-ini-kisah-kapal-selam-pesanan-indonesia-yang-bikin-korsel-rugi-bandar?page=2>.
- Rustam, Ismah. 2016. "Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (Juni): 1-21.
- Sabana, Dizar R., Curie Maharani, and Iis Gindarsah. 2023. *Tren Pasar Senjata Global dan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
- Sadeli, Hasan. 2021. "Tumbuhnya Kesadaran terhadap Ruang Pertahanan Kita Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa,

- 18 Mei Tumbuhnya Kesadaran terhadap Ruang Pertahanan Kita.” Sindonews.com.
<https://nasional.sindonews.com/read/429576/18/tumbuhnya-kesadaran-terhadap-ruang-pertahanan-kita-1621253112>.
- Santiko, Utaryo, and Maria D. Agustieni. 2022. “KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA- PERANCIS DALAM MEMENUHI MINIMUM ESSENTIAL FORCE TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015 - 2019.” *MOESTOPO JOURNAL INTERNATIONAL RELATIONS* 2, no. 1 (Maret): 77-90.
- Santosa, Iwan. 2018. “Kompas Pasang Surut Menuju Armada Kelas Dunia.” Tutur Visual. <https://interaktif.kompas.id/baca/armada-tni-al/>.
- Sari, Haryanti P., and Diamanty Meiliana. 2022. “Diresmikan Megawati, Ini Spesifikasi Kapal Korvet "KRI Bung Karno-369" Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diresmikan Megawati, Ini Spesifikasi Kapal Korvet "KRI Bung Karno-369"", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/>.” nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/20/16451781/diresmikan-megawati-ini-spesifikasi-kapal-korvet-kri-bung-karno-369>.
- Sekretaris Kabinet. 2022. “Luncurkan Defend ID, Presiden: Jadikan Lompatan Transformasi Industri Pertahanan Indonesia.” setkab.go.id. <https://setkab.go.id/luncurkan-defend-id-presiden-jadikan-lompatan-transformasi-industri-pertahanan-indonesia/>.
- Sembiring, Krina. 2022. “Naval Group dan PT PAL Kerja Sama Pengembangan Mesin Kapal Selam Indonesia.” SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/932567/14/naval-group-dan-pt-pal-kerja-sama-pengembangan-mesin-kapal-selam-indonesia-1667578268>.
- Sipayung, Ronald S. 2024. “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024.” Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>.
- SIPRI. 2024. “European arms imports nearly double, US and French exports rise, and Russian exports fall sharply.” www.sipri.org. <https://www.sipri.org/media/press-release/2024/european-arms-imports-nearly-double-us-and-french-exports-rise-and-russian-exports-fall-sharply>.
- Sudrajat, Tatang, Mukhsin Al-Fikri, and Tresya Wulandari. 2022. “Netralitas Tni Dalam Pemilu : Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan.” *Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (Juli): 491-500.
- Sutanto, Rudy, Dovian Isjarvin, Hikmat Z. Almubariq, and Nanang H. Soebijakto. 2021. “Dinamika Alutsista TNI AL Komponen Utama

- Kekuatan Maritim.” *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. 3 (Desember): 223-233.
- Tempo. 2024. “Bamsoet Dorong Kapal Selam TNI AL Jadi Garda Terdepan Maritim.” [nasional.tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1842268/bamsoet-dorong-kapal-selam-tni-al-jadi-garda-terdepan-maritim](https://nasional.tempo.co/read/1842268/bamsoet-dorong-kapal-selam-tni-al-jadi-garda-terdepan-maritim).
- TNI. 2017. “Kiprah TNI Dalam Menjalankan Politik Negara | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA.” TNI. <https://tni.mil.id/view-121638-kiprah-tni-dalam-menjalankan-politik-negara.html>.
- “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.” 2014. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.
- “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.” 2011. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>.
- Utomo, Destianto N., Judy Sudrajat, and Muhammad Halkis. 2023. “KOLABORASI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-PERANCIS; STRATEGI MENGURANGI KETEGANGAN DI KAWASAN INDO-PASIFIK.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 9 (2): 25-52.
- “UU No. 34 Tahun 2004.” 2004. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.
- voaindonesia. 2022. “Australia Setuju Bayar Kompensasi atas Pembatalan Kontrak Kapal Selam Prancis.” VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/australia-setuju-bayar-kompensasi-atas-pembatalan-kontrak-kapal-selam-prancis-/6614992.html>.
- Wareza, Monica. 2020. “Ada Kabar Kurang Sedap, Produksi Kapal Selam RI-Korea Batal?” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201118194809-4-202902/ada-kabar-kurang-sedap-produksi-kapal-selam-ri-korea-batal>.
- Wicaksono, Eko, Sidiq S. Nugroho, and Arti D. Woroutami. 2020. “Pola Konsumsi dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia.” *Kajian Ekonomi & Keuangan* 4, no. 1 (September): 2-11.
- Widyaiswara, Arfin. 2023. “Artikel :: MELEPASKAN KETERGANTUNGAN PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.” BPPK Kemenkeu. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/m>

elepaskan-ketergantungan-pada-mata-uang-dolar-amerika-serikat-8981
45.

Widyatmoko, Wirandita G., Hikmat Z. Almubaroq, and Herlina J. Saragih.
2022. "Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia."
Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2 (September): 4050-4058.

Zahara, Ervita L., and Arjun Rizky M.N. 2020. "Analisis Ringkas Cepat." DPR
RI.
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>.